

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYALURAN
DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE**



OLEH:

**MUHAMMAD NASWAN MALIK
NIM: 2120203861211031**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYALURAN
DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE**



OLEH:

MUHAMMAD NASWAN MALIK

2120203861211031

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana
Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Naswan Malik

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211031

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3841/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing : Rezki Fani, MLM (.....)

NIP : 198706022020122008

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP: 19710208 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyaluran
Dana Bantuan Program Keluarga Harapan
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Naswan Malik

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211031

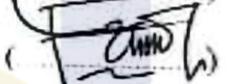
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-3841/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025
Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Rezki Fani, M.M. (Ketua) 

Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota) 

Hj. Fahmiah Akilah, M.M. (Anggota) 

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Muzdifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyelesaikan penulisan laporan akhir skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda saya NASRAH yang telah melahirkan penulis, memberikan kasih sayang yang tak ada hentinya serta selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis. Beliau sangat berarti bagi penulis tanpa beliau mungkin penulis tidak akan sejauh ini untuk melangkah, terima kasih atas doanya yang sangat bermakna bagi penulis sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan ayah saya RIDWAN karena selama ini telah berjuang untuk kehidupan penulis, walaupun beliau hanya tamatan SMP penulis tetap merasa bangga kepada beliau karena selalu ada bersama penulis sampai saat ini. Beliau mampu mendidik saya dengan baik, memotivasi saya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai ke jenjang sarjana.

Penulis juga memberikan banyak terima kasih kepada pembimbing Ibu Rezky Fani M.M karena telah membimbing penulis dengan sangat baik memberikan masukan yang berguna bagi penulis dan tidak pernah bosan untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal sampai skripsi ini.

Selanjutnya , penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras untuk mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nurfadhillah, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan para staf yang bekerja di kampus yang telah memberikan ilmunya kepada saya sampai bisa di tahap ini dan menyelesaikan studi saya.
5. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan referensi untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk semua teman seperjuangan saya di MKS 1 dan semua sahabat penulis seperti Samsul, Ridwan, Reza, Masriani, Yuyun, Winda, dan Syaripa terima kasih karena kalian telah menjadi teman yang baik dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman satu posko waktu KKN yang sampai saat ini selalu mendukung penulis dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebut namanya satu persatu terima kasih karena selalu ada di belakang penulis selalu memberikan dukungan, semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan nasehat agar tidak mudah menyerah selama pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai saat ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah walaupun sesulit apapun prosesnya. Ini adalah suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

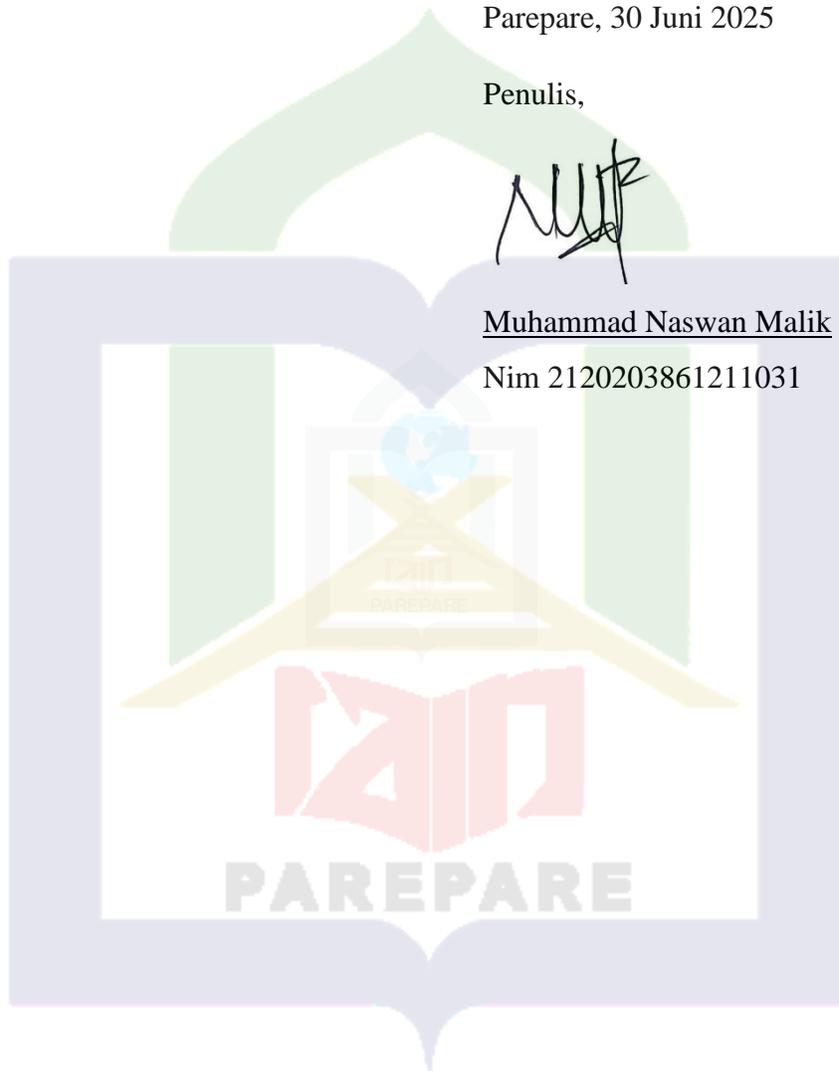
Parepare, 30 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Naswan Malik

Nim 2120203861211031



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naswan Malik
Nim : 2120203861211031
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 4 Februari 2003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyaluran
Dana Bantuan Program Keluarga Harapan
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Menyatakan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa adanya duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau sepenuhnya maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 juni 2025
4 Muharram 1447 H
Penulis,



Muhammad Naswan Malik
NIM. 2120203861211031

ABSTRAK

Muhammad Naswan Malik, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.* (dibimbing oleh Ibu Rezki Fani).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui PKH, keluarga miskin atau rentan miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan bantuan tunai secara berkala, dengan syarat mereka harus memenuhi komitmen tertentu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan program keluarga harapan di kecamatan bacukiki barat kota parepare. Program ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencegah angka kemiskinan melalui penyaluran bantuan tunai maupun non tunai kepada keluarga yang tergolong miskin dan layak mendapat bantuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil 2 kelurahan sebagai objek penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan verifikasi data.

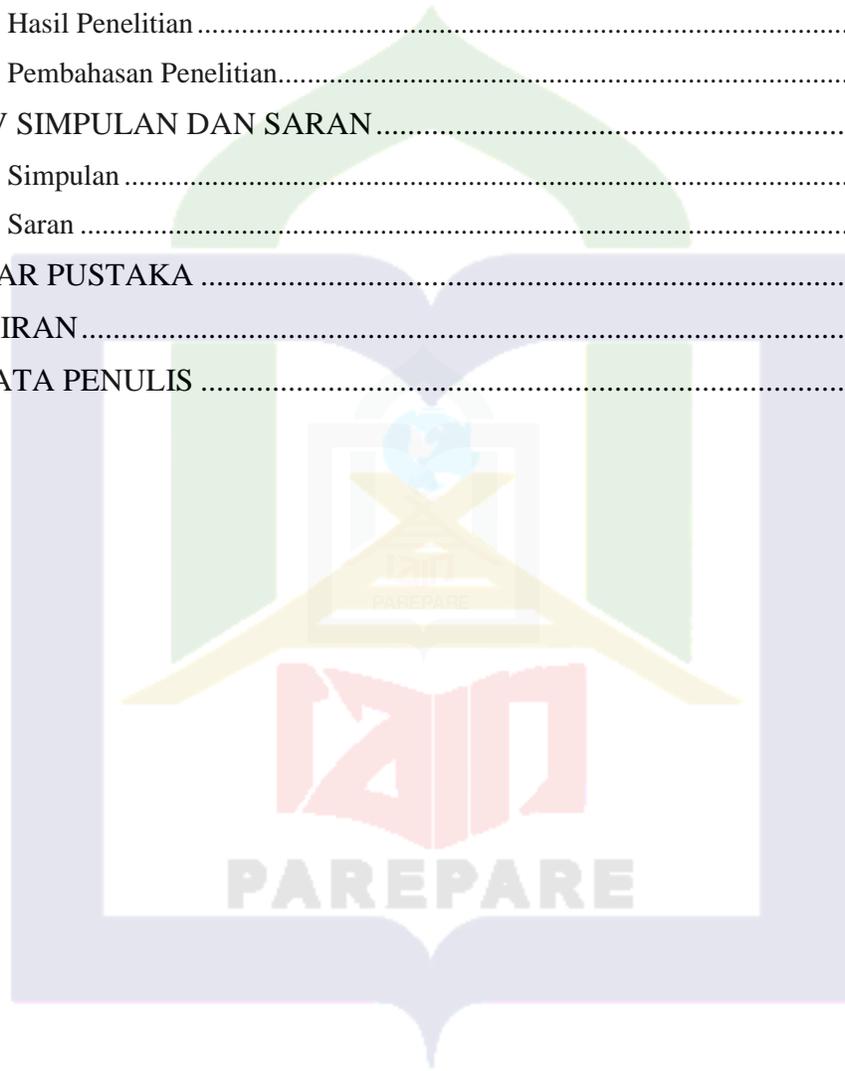
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mekanisme penyaluran dana PKH di Kecamatan Bacukiki Barat sudah berjalan cukup efektif, ditunjukkan oleh adanya peningkatan partisipasi KPM dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan. Adapun faktor penting dalam proses penyaluran dana berupa tepatnya sasaran bantuan ke setiap masyarakat. Namun, efisiensi penyaluran masih menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya jumlah pendamping sosial, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan KPM. Faktor koordinasi antar instansi terkait juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi kelancaran distribusi dana.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Penyaluran Dana, Program Keluarga Harapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teori	21
1. Efektivitas.....	21
2. Efisiensi	25
3. Dana Bantuan Program Keluarga Harapan.....	30
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39

D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan Penelitian.....	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XVII



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2025	3
4.2	Jumlah penduduk kecamatan bacukiki barat	36
4.3	Jumlah penduduk menurut kelompok umur kecamatan bacukiki barat (%)	37



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	26
2	Peta kecamatan bacukiki barat	35
3	Luas daerah menurut kelurahan	36
4	Mekanisme Penyaluran Dana	46



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	II
2	Pedoman Wawancara	III
3	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	IV
4	Surat Penelitian dari Kampus	V
5	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VI
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
7	Berita Acara Revisi Judul	VIII
8	Surat Keterangan Wawancara	IX
9	Dokumentasi	XVI
10	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	Le
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) (yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dhomma	U	U

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَّو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
 يموت : yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمَ : *nu‘ima*
 عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabi khusus al-sabab

9. Lafzal-jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi 'alinnās ilaladhīb iBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu) NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et. al: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah negara ini berkomitmen untuk menegakkan urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat dalam rangka menghormati otonomi dan pembantuan. Melalui peningkatan peran serta, pemberdayaan, dan pelayanan, otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum rakyat. Antara lain, diharapkan daya saing daerah dapat ditingkatkan melalui otonomi luas, dengan tetap menekankan asas-asas demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi daerah memberikan perhatian lebih kepada daerah dalam menangani segala permasalahan dan memungkinkan daerah untuk mandiri memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensinya. Setiap daerah memiliki karakteristik yang unik. Asal usul Otonomi Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa

¹ Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah." Jurnal Projemen UNIPA

"dalam pengembangan Otonomi Daerah, perlu lebih menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta menekankan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan setiap daerah secara individual. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Pendapatan daerah sangatlah penting untuk dikelola dengan baik karena merupakan sumber daya keuangan untuk kegiatan otonomi daerah.³ Daerah perlu melakukan analisis untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah dilakukan secara efisien dan efektif atau belum dengan menghitung kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan keuangan dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴ Salah satu kewenangan yang diberikan pada daerah yaitu kewenangan dalam menggali dan mengolah pendapatan daerah.⁵

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola perekonomiannya sendiri pada saat ini merupakan salah satu hasil utama dari desentralisasi ekonomi, serta transfer kekayaan dari satu daerah ke daerah lain. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan dan diorganisir dengan baik agar dapat berfungsi secara efisien, efektif, dan transparan, serta ekonomis, adil, layak, dan bermanfaat bagi perekonomian. Tergantung pada situasinya, pemerintah daerah dapat memprioritaskan penggunaan dana yang diperlukan, seperti pendidikan

² DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999."

³ Irwan Moridu (2021) "Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai." Jurnal Sinar Manajemen. Vol 8 No 1 Hal 90-97

⁴ Jumame, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong."

⁵ Zulkarnain, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare", Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2017

kesehatan, infrastruktur dan pekerjaan umum, dan sebagainya.⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan dukungan sosial yang bersifat kebajikan kepada anggota keluarga dan penyewa. Model Transfer Sosial yang didasarkan pada konsep Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) digunakan dalam program jaminan sosial PKH. Penyaluran PKH dilakukan secara metadis selama kurun waktu satu tahun melalui Bank/Pos Penyalur, baik tunai maupun tidak. Adapun tujuan PKH diantaranya meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa kategori, antara lain ibu hamil/nifas, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/ sederajat), penyandang disabilitas, dan lansia. Kategori penerima dan bantuan sosial ini biasanya sangat miskin. Penerima manfaat harus mengetahui dan memasukkan informasinya ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau disebut juga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tabel 1. Data Penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2025

Kategori	Indeks/tahun	Indeks/3 bulan	Indeks/ 2 bulan	Indeks/bulan
Ibu hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
Anak usia 0-6 tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
Anak sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
Anak sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000
Anak sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666

⁶ Setyaningsih Hana and Putri Nabila Septiana, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang."

Disabilitas berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
Lansia 60 tahun +	2.400.000	600.000	400.000	200.000
Korban pelanggaran HAM	10.800.000	2.700.000	1.800.000	900.000

Sumber: Website Kementerian Sosial

Dari tabel diatas menggambarkan alokasi dana untuk berbagai kategori Penerima Manfaat dalam PKH yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi keluarga miskin yang ada di Indonesia.⁷

Kriteria KPM PKH dari aspek komponen kesehatan adalah anggota keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak balita. Di sisi lain, komponen pendidikan keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki anak usia sekolah dari 6 hingga 21 tahun yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, serta komponen kesejahteraan sosial keluarga miskin yang memiliki lansia dan penyandang disabilitas berat.⁸ Dari hasil observasi awal ke masyarakat dan berita yang saya dapatkan bahwa terdapat masalah yaitu telatnya penyaluran dana PKH yang ada di kelurahan bumi harapan serta saya juga sudah bertanya ke masyarakat penerima bantuan PKH ini bahwa bantuan ini dapat diterima setiap dua bulan sekali dan mempunyai kartu khusus yaitu kartu PKH.

Sejak awal Program Keluarga Harapan telah inovatif dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Arah kebijakan PKH tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung penyaluran bantuan secara sosial, namun juga bagaimana melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak mengurangi syarat

⁷ Kementerian Sosial “Program Keluarga Harapan (PKH).”

⁸ Harahap. M, “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota medan” Universitas Medan Area. h. 2

kepesertaan, namun juga agar KPM PKH dapat berdaya dan mandiri.⁹ Dengan demikian, sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan sering muncul, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan secara maksimal.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di Kelurahan Bumi Harapan telah sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Bumi Harapan yang merupakan salah satu kelurahan di kota Parepare memiliki jumlah penduduk sekitar 1850 jiwa, termasuk 380 kepala keluarga. Kecamatan Bacukiki Barat Dalam Angka 2024 merupakan publikasi BPS Kota Parepare yang memuat beragam jenis data yang dikumpulkan dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan lingkungan, pemerintahan, penduduk, pertanian, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kecamatan Bacukiki Barat. Mengingat kebutuhan konsumen yang terus berubah, maka publikasi Bacukiki Barat Dalam Angka akan terus dilakukan analisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹¹

Anggaran yang dibahas terkait dengan kelurahan ini meliputi beberapa program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan administrasi. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengelolaan keuangan

⁹ Yusuf Hidayat, Laila Azkia, "Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*. h. 4

¹⁰ Priharjanto and Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan."

¹¹ Statistik, "Kecamatan Bacukiki Barat Dalam Angka 2024."

yang tidak hanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun juga mampu mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat?
2. Faktor-faktor penting dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat?
3. Kendala apa saja yang sering muncul dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan yang ada pada Kecamatan Bacukiki Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penting dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang sering muncul dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan yang ada pada Kecamatan Bacukiki Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran dana kelurahan. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan teoritis yang diajarkan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hal ini dipandang untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap pokok bahasan, yang khususnya berguna ketika menerapkan pengetahuan tentang efektivitas dan efisiensi keuangan laporan anggaran dana kelurahan dalam praktik.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat mengupgrade dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan di instansi tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan dukungan bagi pemerintah Kelurahan Bumi Harapan dalam perumusan kebijakan.

d. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi landasan pendidikan dan sumber pengetahuan bagi peneliti lain untuk bersama-sama menilai dan meningkatkan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi laporan anggaran dana kelurahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan deskripsi mengenai kajian penelitian terdahulu yang mirip dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang akan ditulis merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Rahma Muin *“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerimaan Bantuan di Desa Laliko Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.”* Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi dan menghubungkan fenomena dengan dunia nyata sebagai ciri, karakter, model, atau gambaran tertentu tentang suatu situasi, kondisi, atau fenomena tertentu. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Laliko Kecamatan Campalagian. Dua jenis sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data kedua. Metode pengumpulan data meliputi observasi, analisis dokumen, kepustakaan penelitian, dan wawancara mendalam. Tiga (tiga) langkah analisis dan teknik analisis data meliputi redundansi data, analisis data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Laliko dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, namun PKH belum dapat dikatakan efektif dalam hal kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh indikator perubahan yang dialami masyarakat.

Tantangan dalam menjalankan program keluarga harapan adalah belum mencapai sasaran yang ditetapkan oleh PKH karena masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan dana yang diberikan PKH karena permasalahan tertentu. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat umum secara konsisten menghimpun dana PKH sehingga dapat dijadikan pedoman dalam membantu mereka menciptakan kegiatan kemandirian. PKH diyakini dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menurunkan angka kemiskinan. Implikasi penelitian ini yaitu penerima manfaat dan kesadaran lebih mengenai dana PKH ini seharusnya diurnal ahya sehingga uang yang diterima tidak tidak tidak begitu saja.¹² Sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkonsentrasi pada PKH, dengan menganalisis efektivitas penyaluran dana PKH. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dari sisi manfaat dan pelaksanaan. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Laliko, dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pada akhirnya, penelitian saya berfokus pada efisiensi penelitian dengan menganalisis efisiensi aliran dana, sedangkan penelitian terdahulu lebih memperhatikan efektivitas dan kendala yang diamati. Konteks dan pokok bahasan penelitian ini mencakup konteks dan pokok bahasan yang berbeda yang dapat memengaruhi hasil dan analisis.

Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati *“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesehatan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”*. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia

¹² Rahmah Muin, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam.

untuk mempromosikan kemiskinan di antara masyarakat. PKH Kota Aceh Barat Dayat di Kecamatan Tangan-Tangan telah membantu 1.006 orang miskin menerima bantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Dayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Menurut temuan penelitian, program PKH sudah efektif karena telah memenuhi sejumlah indikator efektivitas, seperti sejauh mana peserta memahami program, tujuannya, dan waktu serta tujuannya. Yang lebih penting, pendekatan ini telah meningkatkan kualitas hidup sebagian besar masyarakat miskin di wilayah Tangan Tangan sejak pandemi COVID-19. Namun, salah satu tantangan dalam melaksanakan tugas ini adalah kurangnya koordinasi antara kepala desa dan masyarakat.¹³ Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitian ini adalah PKH dan dana bantuan PKH, dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tangan-tangan, sedangkan penelitian saya dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Waktu dan konteks Penelitian ini berfokus pada dampak program selama pandemi COVID-19, yang dapat memengaruhi hasil dan analisis yang akan kami lakukan.

Linda Oktaviani dan Ivan Budi Susetyo, *“Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Idaman (PKH) dalam

¹³ Abizal, Maimun, and Yulindawati, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*

meningkatkan kualitas hidup siswa di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur pada tahun 2021 serta memahami tantangan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Idaman (PKH) atau yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, telah berjalan efektif sejak tahun 2021, namun belum mencapai potensi maksimalnya karena masih terdapat sejumlah indikator yang belum akurat. Hal ini antara lain keterlambatan pencairan dana, kesulitan penjadwalan pertemuan kelompok periap bulan, dan keterlambatan peserta PKH dalam hal pembacaan dokumen. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan Unit Pelaksana Program Keluarga Idaman harus melakukan koordinasi yang efektif, mulai dari kota hingga daerah, serta penyalur bank terkait dana pencairan, guna mengatasi kendala tersebut di atas. Pendamping PKH harus menjelaskan bahwa kehadiran dalam Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) merupakan bentuk komitmen dan tugas anggota PKH. Selain itu, operasional PKH harus menyediakan sistem yang diperlukan untuk pemantauan Program Keluarga Idaman (PKH).¹⁴ Sejalan dengan penelitian ini, kami fokus pada PKH dan menganalisis efektivitas dana penyaluran PKH. Selain itu, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data mengenai pengalaman dan pandangan penerima. Perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian ini, yaitu di Kelurahan Kayu Putih, sedangkan penelitian saya di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Fokus penelitian ini adalah efisiensi dan kendala yang diamati, sedangkan fokus penelitian ini adalah pada efektivitas dan efisiensi dana

¹⁴ Oktaviani and Susetyo, "Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

penyaluran. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, meskipun mungkin dapat menyertakan periode waktu dan konteks yang berbeda yang dapat memengaruhi hasil.

Fitri Aningsih Elia dan Yahya Nusa, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika*”. Penelitian ini dilakukan di Desa Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam upaya kemiskinan di Desa Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penggunaan kamera, buku catatan, dan teknik daftar wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pekerja sosial melakukan analisis sosial sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (2) Pekerja sosial melakukan analisis sosial sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (3) Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Manfaat PKH yang dimanfaatkan oleh penerima PKH tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dengan fokus pada PKH, dimana kedua penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan dana PKH dan metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dari penerima manfaat dan pelaksanaannya. Perbedaannya pada lokasi penelitian ini berada di Kampung Nawaripi, sedangkan penelitian saya berada di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota

¹⁵ Elia, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika.” JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi).

Parepare. Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas dan efisiensi dana, penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas dan kendala yang sebenarnya. Penelitian ini mungkin memengaruhi berbagai faktor lokal yang dapat memengaruhi hasil dan analisis yang akan dilakukan.

Resky Sirupang Kanuna, Juanda Nawawi, Nurlinah. *“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah model evaluasi untuk analisis kebijakan publik terkait implementasi program Keluarga Harapan di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Ada beberapa kriteria yang dikembangkan William N. Dunn untuk mendukung evaluasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi PKH telah berjalan dengan sukses sesuai dengan tujuan organisasi, yang meliputi peningkatan taraf hidup peserta PKH melalui partisipasi aktif dalam kesehatan dan pendidikan.¹⁶ Persamaan sama-sama berfokus pada PKH dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data penerima manfaat dan pelaksanaannya. Studi ini dilakukan di kecamatan Sopai, sedangkan studi berikutnya akan dilakukan di kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Konteks dan pokok bahasan studi ini berbeda, yang dapat memengaruhi analisis dan hasil.

¹⁶ Kanuna, Nawawi, and Nulinah, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.”. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Nama, Tahun, Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
<p>Rahma Muin 2020. <i>“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerimaan Bantuan di Desa Laliko Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.”</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Laliko dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, namun PKH belum dapat dikatakan efektif dalam hal kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh indikator perubahan yang dialami</p>	<p>Semua penelitian membahas tentang efektivitas (dan sebagian juga efisiensi) program bantuan sosial, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH). Rata-rata menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan dan pelaksanaan program PKH, termasuk dampaknya pada penerima manfaat.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas PKH terhadap penerimaan bantuan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang efektivitas dan efisiensi penyaluran dana bantuan PKH.</p>

	<p>masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat umum secara konsisten menghimpun dana PKH sehingga dapat dijadikan pedoman dalam membantu mereka menciptakan kegiatan kemandirian. PKH diyakini dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menurunkan angka kemiskinan.</p> <p>Implikasi penelitian ini yaitu penerima manfaat dan kesadaran lebih mengenai dana PKH ini seharusnya diurnal ahya sehingga uang</p>		
--	---	--	--

	yang diterima tidak tidak tidak begitu saja.		
Nova Abizal, 2020. Maimun dan Yulindawati “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesehatan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)”.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Menurut temuan penelitian, program PKH sudah efektif karena telah memenuhi sejumlah indikator efektivitas, seperti sejauh mana peserta memahami program, tujuannya, dan waktu serta tujuannya. Yang lebih penting, pendekatan ini telah meningkatkan	Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) terkait penyaluran dana bagi keluarga miskin dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sama-sama bertujuan mengukur efektivitas penyaluran bantuan sosial, baik dalam hal ketepatan sasaran,	Penelitian ini menyoroti <i>efektivitas</i> dan <i>efisiensi</i> penyaluran dana, sementara beberapa penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada efektivitas program, tanpa membahas efisiensi secara terperinci. Ada perbedaan konteks sosial dan waktu; misalnya, pada studi Aceh Barat Daya analisis dilakukan pada masa pandemi COVID-19

	<p>kualitas hidup sebagian besar masyarakat miskin di wilayah Tangan Tangan sejak pandemi COVID-19. Namun, salah satu tantangan dalam melaksanakan tugas ini adalah kurangnya koordinasi antara kepala desa dan masyarakat</p>	<p>ketepatan waktu, maupun pencapaian tujuan program. Seluruh penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data utama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi dari pelaksana dan penerima manfaat.</p>	<p>sehingga faktor dampak pandemi menjadi pembeda hasil serta tantangan implementasi.</p>
<p>Linda Oktaviani dan Ivan Budi Susetyo, 2020.</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga</p>	<p>Keduanya membahas Program Keluarga</p>	<p>Menilai efektivitas dan efisiensi penyaluran dana</p>

<p><i>“Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021”.</i></p>	<p>Idaman (PKH) atau yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, telah berjalan efektif sejak tahun 2021, namun belum mencapai potensi maksimalnya karena masih terdapat sejumlah indikator yang belum akurat. Hal ini antara lain keterlambatan pencairan dana, kesulitan penjadwalan pertemuan kelompok periap bulan, dan keterlambatan peserta PKH dalam hal pembacaan dokumen. Pusat Data dan Informasi</p>	<p>Harapan (PKH), khususnya terkait efektivitas penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sama-sama bertujuan menilai sejauh mana</p>	<p>PKH sedangkan penelitian terdahulu Fokus khusus pada efektivitas penyaluran PKH. Menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi dan Mahsun serta mengaitkan dengan efisiensi menurut Mardiasmo sedangkan penelitian linda Menggunakan teori efektivitas dari Budiani (dalam Nurfauziah & Nurcahyanto) dengan empat indikator utama.</p>
--	--	---	--

	<p>Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan Unit Pelaksana Program Keluarga Idaman harus melakukan koordinasi yang efektif, mulai dari kota hingga daerah, serta penyalur bank terkait dana pencairan, guna mengatasi kendala tersebut di atas.</p>	<p>program PKH dapat berjalan efektif, serta mencari kendala-kendala dalam pelaksanaan program.</p>	
<p>Fitri Aningsih Elia dan Yahya Nusa, 2020. <i>“Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pekerja sosial melakukan analisis sosial sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (2) Pekerja sosial melakukan analisis sosial sesuai</p>	<p>Sama-sama membahas Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada efektivitas penyaluran bantuan. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKH</p>	<p>Menilai efektivitas dan efisiensi penyaluran dana PKH sedangkan penelitian fitri fokus pada efektivitas PKH. Ada kendala teknis dan struktural, seperti keterlambatan</p>

<p><i>Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika”.</i></p>	<p>dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan; (3) Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat yang mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Manfaat PKH yang dimanfaatkan oleh penerima PKH tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian.</p>	<p>dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan menilai keberhasilan pelaksanaannya. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>pencairan, kurangnya pendamping, dan minimnya literasi KPM sedangkan penelitian terdahulu Ada kendala dari segi pendataan KPM yang kurang akurat dan keterbatasan komunikasi di lapangan.</p>
<p>Resky Sirupang Kanuna, Juanda Nawawi, Nurlinah. 2020. <i>“Evaluasi Program Keluarga</i></p>	<p>Ada beberapa kriteria yang dikembangkan William N. Dunn untuk mendukung evaluasi, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan,</p>	<p>Keduanya meneliti Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dari aspek evaluasi pelaksanaan dan</p>	<p>Menganalisis efektivitas dan efisiensi penyaluran dana bantuan PKH sedangkan penelitian yang</p>

<p><i>Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara</i>".</p>	<p>pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi PKH telah berjalan dengan sukses sesuai dengan tujuan organisasi, yang meliputi peningkatan taraf hidup peserta PKH melalui partisipasi aktif dalam kesehatan dan pendidikan</p>	<p>dampaknya terhadap keluarga penerima manfaat (KPM). Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.</p>	<p>dilakukan resky sirupang Mengevaluasi kualitas hidup KPM melalui pelaksanaan program PKH. Penelitian saya menggunakan beberapa kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat sedangkan penelitian terdahulu Tiga desa di Kecamatan Sopai (Langda, Tombang Langda, Salu)</p>
--	---	--	--

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi mengatakan Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh secara jujur. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Semakin besar keluaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka organisasi, program, atau kegiatan akan semakin efektif. Jika ilmu ekonomi berfokus pada masukan dan efisiensi pada keluaran atau proses, maka efektivitas berfokus pada hasil.¹⁷

Menurut Mahsun, Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa beberapa parameter yang diinginkan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Ketika persentase target meningkat, maka efektivitasnya pun meningkat. Selain itu, efektivitas menunjukkan bahwa hasil dari strategi tersebut belum sebaik yang diharapkan.¹⁸ Strategi manajemen dapat menjadikan suatu BMT dapat melaksanakan aktivitas operasional dengan lebih efisien dan efektif.¹⁹

Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer dapat dianggap efektif jika mereka mampu mengidentifikasi tugas yang perlu diselesaikan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan dan sasaran manajemen; dalam konteks ini, istilah "efektivitas" hampir selalu digunakan untuk menggambarkan seberapa baik rencana dijalankan dibandingkan dengan kenyataan.²⁰ Suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika hasil yang diperoleh

¹⁷ Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik" (Yogyakarta, 2010) h. 86-87

¹⁸ Mahsun, "Pengukuran Kinerja Sektor Publik" (Yogyakarta, 2012)

¹⁹ Damirah, Muhlis, "Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kjks Bmt Al Markaz Al Islami Makassar," *Iqtishaduna* Vol. 10 (2019).

²⁰ Sitti Mujahida, "Pengantar Manajemen" (Makassar, 2018) h. 26-27

dapat mencapai hasil yang diinginkan, atau jika dapat digambarkan sebagai pengeluaran yang bijaksana.

Output yang dihasilkan dari organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgment*). Efektivitas kelompok adalah adanya pandangan yang menyatakan bahwa setiap anggota kelompok bekerja sama. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota.²¹

b. Indikator Efektivitas

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah proses merancang program sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Hal ini juga ditunjukkan ketika program dapat diimplementasikan dengan mudah dan efektif sepanjang proses pelaksanaan tugasnya. Penting untuk dipahami bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program terlibat. Setelah pemahaman program tercapai, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan implementasi program.

2. Tepat Sasaran

Sasaran yang tercantum dalam indikator ini merupakan faktor yang harus diperhatikan secara saksama guna mengetahui apakah perilaku program telah sesuai

²¹ Dian Purwanti, "Efektivitas perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru" (Sumatera Barat: cv aska pustaka, 2022), h. 43

dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dianggap efektif apabila telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sejak awal.

3. Tercapainya Tujuan

Indikator ini mengukur ke efektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai. Dan tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.²²

c. Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik Organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan (goals) organisasi, yaitu mencapai hasil tertentu. Tujuan organisasi sangat beragam, misalnya mencari laba, produktivitas, moralitas tinggi, memberikan jasa ke publik, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak semua organisasi bertujuan mencari laba.²³ Penekanan ciri organisasi Steers didasarkan pada struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Inovasi dalam bentuk hubungan interaktif antar anggota organisasi atau penguatan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya beberapa tujuan dalam struktur organisasi, seperti peningkatan spesialisasi fungsional, ukuran organisasi, sentralisasi keputusan, dan formalisasi, maka produktivitas organisasi akan meningkat.

²² M Richard Steers, “Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena) (Jakarta: Erlangga), 1985, 133-136.

²³ Musmulyadi, “Pengendalian Manajemen”. (November, 2020)

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yang saling terkait erat: lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan ekstern mengacu pada semua kekuatan lingkungan eksternal yang muncul dari kegiatan organisasi. Secara umum, lingkungan interen disebut sebagai karakteristik organisasi yang mencakup beberapa aspek lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan mekanisme yang mencakup penerapan tujuan strategis, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya secara efisien, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, sangat penting bagi manajer untuk mengawasi kegiatan secara profesional guna mencapai tujuan.²⁴

2. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangan, operasi, tenaga kerja, material, peralatan, dan

²⁴ M. Richard steers, "Efektivitas Organisasi" (Jakarta: Air Langga, 1999) h. 159

pengeluaran mereka secara efisien.²⁵ Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai pencapaian manfaat dengan biaya serendah mungkin untuk mencapai pengorbanan.²⁶ Menurut Mardiasmo, Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai output maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang tetap untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi adalah perbandingan output dan input yang terkait dengan standar atau tujuan kerja yang ditetapkan. Jika ilmu ekonomi hanya membahas input, yaitu bagaimana membuat input lebih terjangkau atau lebih bernilai, maka efisiensi membahas input dan output.

Efisiensi (*efficiency*) organisasi mengacu pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. efisiensi bagian penting dalam manajemen, sebab menyangkut sumber daya minimal yang diperlukan (masukan) dan menghasilkan sejumlah produksi yang diinginkan (keluaran). Apabila keluaran berupa produk barang atau jasa yang dapat dihasilkan menunjukkan harga yang lebih besar dari masukan diantaranya adalah manusia, uang, bahan mentah dan peralatan, maka manajer telah meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen menaruh perhatian untuk meminimal biaya sumber daya (masukan) tersebut untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Sehingga, dari sudut pandang ini, efisiensi sering dikatakan sebagai “melakukan segala sesuatunya secara tepat” (*do the things right*), artinya tidak memboroskan sumber daya (*resources*) organisasi.²⁷

Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output, yang merupakan produk atau proses, dan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Dalam

²⁵ Fransiska Xaverius Sadikin, “Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas” (Yogyakarta, 2005) h. 157

²⁶ Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, “Meningkatkan Efisiensi Nasional” (Yogyakarta, 2007) h. 199

²⁷ Darwis, *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

istilah matematika, efisiensi adalah rasio output terhadap input atau output terhadap output lain per unit input.

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar- besarnya (*spending well*).²⁸ Efisiensi adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas secara efektif, berdasarkan rasio atau perbandingan terbaik antara input dan output; yaitu, beberapa output yang dihasilkan selama proses tersebut dibandingkan dengan input yang ada. Ketika ukuran output meningkat dan ukuran input yang dibutuhkan menurun, sistem menjadi lebih efisien. Dengan kata lain, seorang manajer dianggap efisien jika mereka mampu mendapatkan hasil yang lebih berkualitas dibandingkan dengan alat yang mereka gunakan (stres terkait pekerjaan, uang, material, dan waktu). Efisiensi menggunakan faktor-faktor yang terkait dengan produksi dan pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi untuk menjelaskan keberhasilan organisasi layanan publik dalam memperoleh laba. Jika digunakan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang relevan.²⁹

Bisnis yang efektif dalam mengelola operasinya tidak akan menciptakan sumber daya. Selain itu, jika bisnis menggunakan lebih banyak tenaga kerja harian daripada yang diperlukan, aktivitas tertentu tidak akan seefisien itu. Sebagai bagian dari proses teknis (pusat biaya yang dirancang), efisiensi diukur dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Biaya standar menunjukkan biaya yang harus terjadi untuk memberikan output yang diinginkan. Setiap organisasi sektor publik perlu memiliki evaluasi pengeluaran standar sebagai bentuk tolok ukur

²⁸ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik" (Yogyakarta: Puastaka Andi 2018)

²⁹ Sitti Mujahida, "Pengantar Manajemen" (Makassar, 2018) h. 25-26

pengeluaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan belanja aktual dengan standar belanjanya. Standar belanja yang disebutkan sebelumnya juga harus disesuaikan untuk memperhitungkan faktor ekonomi serta standar publik minimal yang harus dipenuhi.

b. Indikator Efisiensi

Berikut ini adalah contoh-contoh indicator efisiensi

1. Ketepatan waktu

Efisiensi dapat dilihat dari ketepatan jadwal pencairan bantuan. Bila dana PKH disalurkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, maka hal ini mencerminkan bahwa proses penyaluran berjalan lancar dan efisien. Sebaliknya, jika terjadi keterlambatan, hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam sistem yang bisa mengurangi efisiensi.

2. Biaya

Efisiensi juga bisa dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses penyaluran bantuan. Biaya operasional termasuk biaya transportasi, administrasi, honor pendamping, dan biaya kegiatan lapangan. Jika biaya tersebut bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka penyaluran dinilai efisien.

3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Penggunaan teknologi, seperti aplikasi e-PKH atau sistem pencairan dana non-tunai melalui bank, dapat mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan manual. Efisiensi meningkat ketika proses administrasi, pelaporan, dan pencairan dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan data nasional.

4. Tingkat kepuasan KPM

Meskipun termasuk dalam ranah efektivitas, kepuasan penerima manfaat terhadap proses penyaluran juga dapat digunakan untuk menilai efisiensi. Jika KPM merasa prosesnya cepat, tidak rumit, dan tidak membutuhkan biaya tambahan (misalnya untuk transportasi ke bank atau loket), maka proses tersebut tergolong efisien dari sisi penerima.³⁰

c. Prinsip efisiensi

Salah satu kegiatan dalam organisasi adalah efisien atau tidak. Berikut ini adalah beberapa contoh untuk menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menerapkan Efisiensi sebagai berikut:

1. Efisiensi harus dapat di ukur

Salah satu standar yang harus dibedakan antara yang efisien dan yang tidak adalah kisaran tipikal. Jenis ukuran ini merupakan langkah awal (standar) untuk menentukan apakah suatu kegiatan tertentu efisien atau tidak. Ada kisaran normal untuk pengorbanan, yaitu jumlah pengorbanan yang sesuai dengan jumlah hasil maksimum. Jika tidak dapat dipahami, tidak mungkin untuk menentukan apakah suatu kegiatan tertentu efisien atau tidak.

2. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional

Rasional mengacu pada setiap pengembangan yang harus didasarkan pada gaya hidup sehat, tubuh yang sehat, dan logika yang tidak emosional. Mempertimbangkan pertimbangan rasional ini. Sedapat mungkin, tujuan pengukuran dan penilaian tidak boleh dihalangi.

3. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu)

³⁰ Mahmudi. *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”*. (Yogyakarta, 2010)

Mutu harus tetap dijaga dengan baik. Dengan cara ini, kuantitas produk dapat ditingkatkan sampai pada titik jangan sampai menurunkan kualitasnya. Tidak hanya menunjukkan kuantitas produk, tetapi juga menunjukkan kualitas. Sejahh menyangkut hasil yang diinginkan, kualitas hasilnya buruk.

4. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Eksekusi operasional dapat dilakukan seefisien mungkin. Alhasil, tidak ada pemborosan atau jangan sampai terjerat dengan atasan yang sering terjadi. Operasi yang efisien harus dilakukan sesuai dengan kemampuan organisasi Dalam hal ini, penerapannya sesuai dengan kemampuan manusia, dana, fasilitas, dan hal-hal lain yang dimiliki oleh bisnis dan mendukung pertumbuhannya. Setiap organisasi, baik instansi pemerintah, swasta, maupun bisnis, memiliki kemampuan yang unik.³¹ Peningkatan efisiensi ini sebaiknya didasarkan pada tingkat potensi manusia yang dimiliki, termasuk sumber daya, dana, dan fasilitas yang dimiliki.

3. Dana Bantuan Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mengatasi permasalahan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan dan kesehatan. Lokasi PKH merupakan komponen program lain yang melibatkan kemiskinan, sedangkan Program Keluarga Harapan merupakan program yang melibatkan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengawasi program Keluarga Harapan baik secara lokal maupun nasional.³²

³¹ Ibnu Syamsi, "Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja" (Jakarta, 2007) h. 26

³² Banjamsos, Ditjen. "Buku Kerja Pendamping PKH." (2010).

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemerintah yang merupakan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat baik pendidikan maupun kesehatan.³³ Program Keluarga Harapan ini merupakan suatu progra yang bisa mencegah angka kemiskinan yang ada di indonesia. Adapun ayat yang sesuai dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tentang fakir miskin yaitu surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

بِمَا وَاللَّهُ سَيَّاتِكُمْ مِّنْ عَنكُمْ وَيُكَفِّرُ ۖ لَّكُمْ خَيْرٌ فَهُوَ الْفُقَرَاءَ وَتُؤْتُوهَا نُحْفُوهَا وَإِنَّ ۗ هِيَ فَنِعْمًا الصَّدَقَاتِ تَبْدُوا إِنْ خَيْرٌ تَعْمَلُونَ

In tubdūṣ-ṣadaqāti fani‘imma hiy, wa in tukhfūhā wa tu‘tūhal-fuqarā’ a fahuwa khairul lakum, wa yukaffiru ‘an kum min sayyi’atikum, wallāhu bimā ta‘malūna khabīr.

Artinya:

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁴

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan Program Keluarga Harapan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Kurangi beban, hal ini termasuk pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
3. Perubahan perilaku, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan.
4. Kurangi kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

³³ Arwin, et.al, “Program Keluarga Harapan dalam mendukung taraf hidup masyarakat: Kajian implementasi di Parepare”. 2021.

³⁴ QS. Al-Baqarah:271

5. Inklusi keuangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat.³⁵

c. Hak dan kewajiban penerima PKH

Adapun Hak untuk peserta PKH yaitu sebagai berikut:

1. Menerima bantuan tunai yang disesuaikan dengan ketentuan program.
2. Menerima layanan dan fasilitas kesehatan bagi setiap anggota keluarga.
3. Terdaftar dan menerima program yang saling melengkapi demi penanggulangan kemiskinan.
4. Bagi lansia diatas di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan kebutuhan dasar dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Kewajiban KPM PKH terdiri dari :

1. Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori ibu hamil/menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
3. Anggota keluarga, yang termasuk dalam kategori lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan.
4. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

³⁵ Banjamsos, Ditjen. "Buku Kerja Pendamping PKH." (2010).

5. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang ditetapkan sebagai peserta didik PKH wajib melakukan penelitian terkait pendidikan apabila memiliki anak usia 6 sampai dengan 15 tahun. PKH ini dipersyaratkan untuk mendaftarkan anak di SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti minimal 85 persen kelas pada setiap semester tahun ajaran.
6. Terkait kesehatan RTSM yang dijabarkan sebagai tenaga PKH, wajib melakukan persyaratan terkait kesehatan apabila terdapat anggota keluarga yang berusia antara 0 sampai dengan 6 tahun dan/atau orang tua atau wali. Apabila anak berusia enam tahun sudah masuk sekolah dasar, RTSM akan mengikuti kegiatan terkait pendidikan.³⁶

d. Kriteria Penerima PKH

Berikut ini adalah beberapa kriteria untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

1. Kesehatan

Peserta PKH harus memenuhi persyaratan kesehatan yang tercantum dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

a. Anak usia 0-6 tahun:

- 1) Anak usia 0-28 hari (bayi baru lahir/neonatus) harus diperiksa sebanyak 3 kali.
- 2) Anak usia 0-11 bulan wajib mendapat imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12 hingga 59

³⁶ Kemensos. "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan"

bulan memerlukan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

- 4) Setiap bulan, anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun secara rutin didaftarkan di sekolah dan didorong untuk mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Ibu hamil dan ibu nifas:

- 1) Ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu 1 kali untuk usia 0–3 bulan, 1 kali untuk usia 4–6 bulan, 2 kali untuk usia 7–9 bulan, dan mendapatkan suplementasi tablet Fe.
- 2) Tenaga kesehatan harus membantu Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan.
- 3) Ibu nifas wajib diperiksa kesehatannya dan memberikan KB pasca melahirkan sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dalam pendidikan yaitu kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% hadir di sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa contoh sebagai berikut:

- a. Persyaratan pendidikan berlaku bagi mereka jika kelompok tersebut mencakup anak yang berusia 5–6 tahun dan telah mulai bersekolah di sekolah formal.
- b. Jika anak berusia 7 sampai 15 tahun, mereka harus ditempatkan di salah satu program pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTS/SMLB, atau SMP/MTS Terbuka).
- c. Apabila mempunyai anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH harus mendaftarkan anak tersebut pada

satuan belajar yang menyelenggarakan wajib sekolah 9 tahun atau pendidikan sederajat.

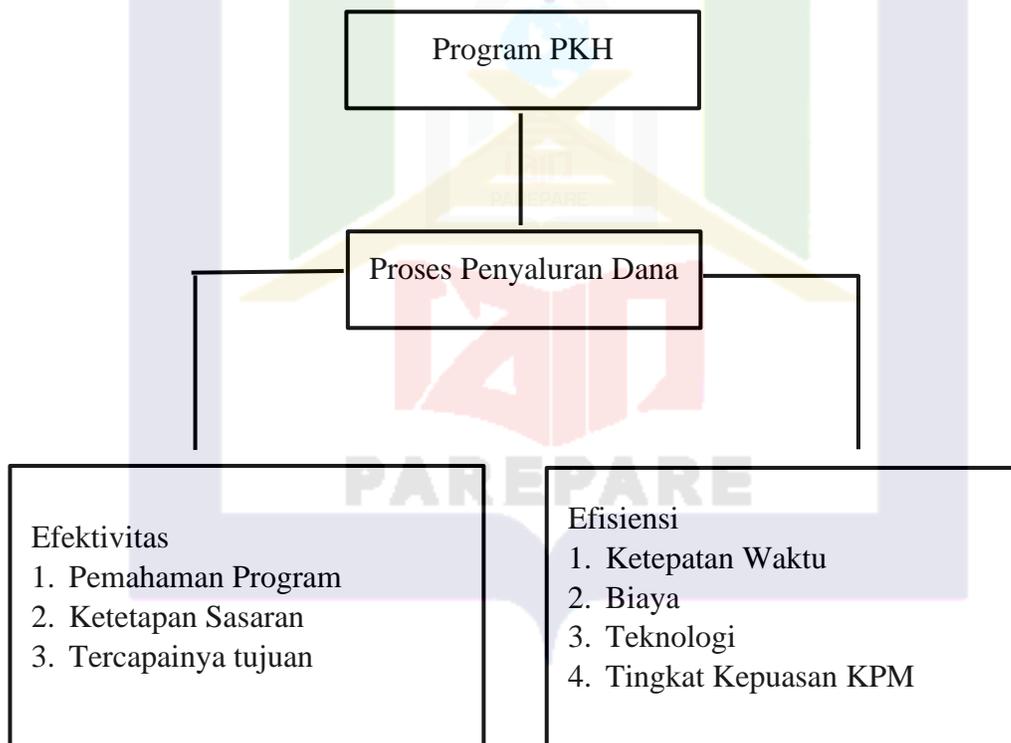
- d. Apabila anak yang bersangkutan pada hakikatnya buta aksara, maka wajib mengikuti program pendidikan fungsional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - e. Jika anak bekerja, juga dikenal sebagai pekerja anak (PA) atau putus sekolah, untuk jangka waktu yang lama, maka data anak tersebut dicatat dan dikirim ke dinas ketenagakerjaan dan pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan program pekerja anak.
 - f. Apabila anak tersebut terpaksa berada di jalanan dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama. Hal ini akan membantu diperolehnya Program Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Lansia 70 tahun ke atas
- 1) Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja kesehatan dapat dilakukan dengan mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - 2) Mengikuti kegiatan sosial (day care).
4. Penyandang disabilitas berat
- a. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
 - b. Tenaga kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat kunjungan rumah (home care).³⁷

C. Kerangka Konseptual

³⁷ TNP2k, "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)" 2 (2019).

Kerangka konsep dalam penelitian ini menjelaskan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada peningkatan kualitas (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak dan ibu hamil) dan bagaimana penyalurannya dilakukan dengan tepat waktu. hubungan antara efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan. Efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan efektivitas menilai pencapaian tujuan. Kedua aspek ini saling mendukung dan penting untuk menganalisis keduanya secara bersamaan guna menilai keberhasilan penyaluran dana dengan baik secara menyeluruh.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah penelitian secara sistematis. Hal ini dapat dipandang sebagai suatu alat pengajaran tentang bagaimana penelitian dilakukan secara etis. Dalam prosesnya, kita mempelajari beberapa teknik yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mempelajari masalah penelitian beserta logika yang melatarbelakanginya.³⁸

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah arah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang artinya data yang digunakan bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di kantor dinas sosial kota parepare. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak didasarkan pada teori melainkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama periode penelitian. Oleh karena itu, analisis data dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dikonstruksi menjadi hipotesis dan teori. Dalam penelitian kualitatif, analisis data diperlukan untuk mengembangkan hipotesis.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare di Jln Jendral Sudirman No 12 serta rumah-rumah KPM PKH di kelurahan bumi harapan dan

³⁸ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Pascal Books.

³⁹ Azkari Zakaria et, al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research and Development" (sulawesi tenggara, 2020) h. 28

⁴⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, 2010) h. 3

kelurahan sumpang minangae. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 (dua) bulan disesuaikan dengan kebutuhan yang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare telah dilakukan secara efektif dan efisien. Peneliti menggunakan 2 kelurahan sebagai objek penelitian yaitu kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae, yang dimana dua kelurahan ini menjadi penerima terbanyak di antara enam kelurahan yang ada di kecamatan bacukiki barat dalam penyaluran bantuan PKH.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mereka menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah teks dan tindakan, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut, maka data yang disajikan pada bagian ini berupa teks dan gambar, data tertulis, gambar, dan statistik.⁴¹ Jenis data yang saya digunakan yaitu data kualitatif yang berisi informasi tentang prosedur, kebijakan, dan persepsi stakeholders terkait Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adapun sumber datanya berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:

⁴¹ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 112.

1. Data Primer

Data primer Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara metodis oleh peneliti untuk menjawab suatu permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan secara eksploratif, deskriptif, atau penelitian eksploratif dengan menggunakan metode seperti survei atau bahkan observasi. Sebagai contoh, data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data penerima PKH, lapangan Observasi, koordinator dan pengawas PKH, serta data sosial.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan struktur data historis yang berkaitan dengan variabel-variabel yang sebelumnya telah ditetapkan dan dievaluasi oleh entitas lain. Sumber data sekunder dapat berasal dari suatu perusahaan (sumber internal), berbagai situs web, publikasi umum, lembaga pendidikan, atau bisnis lain yang secara tulus menjalankan misinya untuk mengelola data sekunder dan data lainnya.⁴² Data sekunder ini dijadikan data pendukung oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data merupakan metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan teknik pengolahan data bersifat abstrak dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik seperti kasat mata tetapi dapat digunakan.⁴³ Terkait dengan pengumpulan data, penulis berpedoman pada tujuan penelitian untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut:

⁴² Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta, 2005), h. 168

⁴³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134.

1. Wawancara

Wawancara adalah jenis wawancara khusus yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan. Selain itu, orang yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara ke berbagai pihak yang terkait seperti:

- a. Kordinator PKH: Untuk memperoleh informasi tentang apakah penyaluran dana yang ada di kecamatan bacukiki barat sudah termasuk layak atau belum dan mencari perbandingan antara efektif dan efisien di setiap kelurahan.
- b. Pendamping PKH: Untuk menggali informasi lebih rinci tentang proses pengelolaan bantuan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan penggunaan dana.
- c. Masyarakat atau Penerima Manfaat: Untuk memperoleh perspektif dari pihak yang merasakan langsung dampak dari penyaluran dana tersebut, apakah bantuan yang di dapat sudah dipergunakan dengan baik.

Tujuan dari wawancara ini untuk membantu peneliti dalam memahami kebijakan, pengalaman, dan persepsi orang-orang yang terlibat langsung dalam kantor dinas sosial kota parepare. Hal ini akan memberi informasi tentang efektivitas dan efisiensi dari sisi manajerial serta tantangan operasional yang dihadapi.

2. Observasi

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipatif, dimana

⁴⁴ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

peneliti langsung terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁴⁵ Tujuan dari observasi ini membantu peneliti untuk melihat secara langsung dan objektif praktik yang dilakukan, tanpa tergantung pada laporan atau keterangan verbal saja. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi partisipan dengan cara turun langsung ke masyarakat dan mewawancarai terkait PKH.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata "dokumen", yang mengacu pada dokumen tertulis. Ketika menggunakan metode dokumentasi, peneliti memeriksa bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, majalah, rapat notulen, harian catatan, dan sebagainya. Tujuan dokumentasi adalah untuk menyediakan data spesifik dan objektif yang mendukung atau memvalidasi temuan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara. Ini juga dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk menentukan apakah teori dan praktik yang ada digunakan secara efektif dalam praktik. Dokumen peneliti adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Analisis data dilakukan untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan akurat atau hanya sekadar penelitian ilmiah yang dilakukan untuk memverifikasi data yang diperoleh. *Kredibilitas* (validitas internal), *transferabilitas* (validitas eksternal), ketergantungan (reabilitas), dan konfirmasi (objektivitas) merupakan faktor-faktor dalam uji data dalam penelitian kualitatif.⁴⁶ Namun peneliti hanya menggunakan uji *credibility* (validitas internal).

⁴⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 2013)

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Di antara metode lainnya, uji kredibilitas (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan member check, triangulasi, diskusi dengan pihak netral, analisis kasus negatif, dan pengamatan. Dalam penelitian ini, hanya triangulasi yang digunakan untuk menilai kredibilitas, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data.

a. Triangulasi

Triangulasi Dalam pengujian ini, triangulasi diartikan sebagai proses menganalisis data dari beberapa sumber dengan menggunakan berbagai metode dan jangka waktu. Penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data dalam triangulasi ini.

1) Triangulasi Sumber

Proses triangulasi data untuk menilai keandalannya melibatkan analisis data yang telah diperoleh melalui sejumlah sumber, seperti deskripsi, klasifikasi, adanya pandangan yang serupa atau berbeda, dan kekhususan masing-masing sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti telah menghasilkan suatu simpulan yang didasarkan pada member check dengan menggunakan semua data yang disebutkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan peserta Program Keluarga Harapan di Bacukiki Barat (seperti koordinator PKH, pendamping PKH, dan masyarakat umum yang menerima manfaat dari program), dokumen pengelolaan anggaran, dan catatan keuangan yang ada.

2) Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menilai keandalan data dilakukan dengan memindahkan data ke sumber yang identik dengan teknik yang berbeda. Data

yang diperoleh, misalnya melalui wawancara, kemudian harus diperiksa melalui observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Data yang di analisis yaitu Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, menjadikan data menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, menemukan dan menganalisis data, menentukan hal yang penting dan hal yang diajarkan, serta menentukan hal yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁴⁷

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian, selama proses penelitian, dan hingga penelitian berakhir. Analisis data dimulai saat peneliti fokus pada penelitian dan diakhiri dengan laporan penelitian yang konklusif. Teknik analisis data digunakan sejak awal penelitian hingga akhir.

Analisis data adalah proses menemukan dan mengorganisasikan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan isinya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, penyajiannya dalam satuan-satuan, melakukan sintesa, penyajiannya dalam suatu pola, menentukan apa yang penting dan akan

⁴⁷ Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Sosial (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993) h. 53

diajarkan, dan menciptakan suatu kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁴⁸



⁴⁸ Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 224.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat

PKH merupakan salah satu program kemiskinan berbasis keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya fasilitas pendidikan atau bahkan fasilitas kesehatan oleh peserta KPM. Dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mengurangi angka dan rantai kemiskinan, serta meningkatkan kinerja KPM yang agak kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan. Berikut ini adalah tata cara perhitungan bantuan dana KPM PKH.

a. Tahap Pendataan dan Verifikasi

Tahap awal dari semua proses Penyaluran Bantuan PKH yaitu pendataan dan verifikasi, calon penerima bantuan PKH nantinya akan melakukan pendataan diri agar terdaftar namanya terdaftar di pusat.

Terkait hal ini, Kementerian Sosial dan dan setiap kelurahan masing-masing memiliki praktik yang berbeda, khususnya yang dilakukan di kecamatan bacukiki barat. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pemerintah Daerah, dan Data Lembaga Lain, KPM PKH dilakukan. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk menentukan anggota miskin mana yang memenuhi syarat untuk menjadi KPM PKH.



Gambar 3 mekanisme penyaluran dana

Kriteria tersebut meliputi: Kemiskinan, Kesejahteraan sosial, Kelengkapan dokumen. Setelah data KPM PKH ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan melakukan penetapan KPM PKH. Penetapan KPM PKH dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPM PKH. Surat Keputusan KPM PKH berisi nama, alamat, dan komponen bantuan yang akan diterima oleh KPM PKH. SK KPM PKH juga berisi kewajiban KPM PKH, seperti mengikuti program PKH dan memenuhi komitmen KPM PKH.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Pak Samsul selaku kordinator PKH terkait tahapan awal serta verifikasi kepada calon penerima bantuan PKH:

“Pendataan dimulai dari data yang sudah ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi tidak akan langsung digunakan. Kita tetap harus turun lapangan untuk verifikasi. Pendamping akan mendatangi rumah calon penerima, mengecek kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, kondisi rumah, dan apakah memenuhi komponen PKH seperti ada anak sekolah, ibu hamil, atau lansia. Setelah itu datanya dicocokkan dengan

dokumen seperti KTP dan KK. Kalau memang layak, data tersebut kita validasi dan masukkan ke sistem. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat, ya kita keluarkan dari daftar usulan”⁴⁹

Selanjutnya wawancara bersama masyarakat dan menanyakan apa saja mekanisme penyaluran dana yang dilakukan di Kelurahan Bumi Harapan. Berikut hasil wawancaranya dengan masyarakat penerima bantuan PKH di kelurahan bumi harapan:

“Awalnya itu ada tim pendata datang ke rumah baru dia tanya-tanya tentang anak, penghasilannya suami, kondisi rumah dan lain-lain, pokoknya banyak dia tanyakan dan terakhir dia foto kk dan ktpku. Beberapa minggu kemudian saya dipanggil ikut sosialisasi di kantor kelurahan. Di situ saya dikasih tahu bahwa saya masuk sebagai penerima, dan nanti akan buka rekening untuk terima bantuannya”⁵⁰

“Saya pertama kali terdaftar sebagai penerima waktu anak saya masih TK. Dulu saya tidak tahu kalau ada petugas yang datang untuk survei rumah, saya pikir itu cuma dari kelurahan saja. Tapi Alhamdulillah setelah didata, saya bisa dapat bantuan sampai sekarang”⁵¹

“Pernah datang pendata di rumah saya kira tentang apa ternyata data untuk calon penerima PKH, ditanya ki tentang kondisi keluarga dan lain-lain”⁵²

Selain itu, saya juga mewawancarai masyarakat penerima PKH di kelurahan sumpang minangae, berikut hasil dari wawancaranya:

“Pertamanya saya didata itu ada datang ke rumah baru dia jelaskan mi kalau dia dari pendata PKH dan kesini untuk tanya-tanya tentang anak, pekerjaan, dan lihat kondisi rumah, trus sudahnya ditanya-tanya bgtu

⁴⁹ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

⁵⁰ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁵¹ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁵² Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

minta mi KK dan KTP ku baru dia bilang bu berdoa ki semoga bisa ki masuk jadi anggota penerima bantuan PKH. Alhamdulillah akhirnya dapat ka juga ini bantuan dan sangat membantu”⁵³

“Biasa memang awal itu ada orang yang datang ke rumah baru natanyanya mi sudahnya itu kutanya data untuk apa ini bu nabilangmi data untuk penerima PKH, langsung ka senang dengar bilang begitu”⁵⁴

“Kalau soal didata selalu mi karena sebelumnya selalu ji di data dan tidak terlalu kuladeni karena kubilang pasti data untuk pak RT ji tapi pas kutau kalau data untuk PKH langsung ka semangat”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan PKH di Kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa program bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.

b. Penetapan Penerima Manfaat

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk mengetahui wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu komponen terpenting dalam pengembangan wilayah PKH adalah data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah. Adapun hasil wawancara dengan Kordinator PKH sebagai berikut:

“Terkait dengan penetapan calon penerima bantuan PKH yang baru semua proses pendataannya itu melalui dinas sosial. Pendataan calon

⁵³ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁵⁴ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁵⁵ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

penerima bantuan PKH itu kami didasarkan pada data DTKS dari Kementerian Sosial. Tapi sebelum itu digunakan, kami juga melakukan verifikasi ulang di lapangan. Jadi, kami turun langsung ke rumah-rumah warga untuk melihat apakah mereka memang memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Misalnya, kita lihat kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan anak sekolah, dan apakah ada ibu hamil atau lansia. Kalau semua itu terpenuhi, baru kita ajukan sebagai KPM PKH. kadang juga ada warga yang sudah terdaftar di DTKS, tapi setelah dicek tidak lagi memenuhi syarat karena ekonominya sudah membaik. Itu juga harus kita coret. Proses verifikasi ini penting supaya bantuan tidak salah sasaran”⁵⁶

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat Kelurahan Bumi Harapan terkait penetapan penerima manfaat beliau menjelaskan:

“Pertamanya tidak yakinka kalau diterima jadi anggota PKH karena kan awalnya cuma di data dan tidak ditau kalau memang rejeki. Disuruhki juga ikut sosialisasi di kantor kelurahan, baru dapatka kabar kalau saya diterima sebagai penerima bantuan PKH. Sudahnya itu langsung diajak buka rekening sama pendamping PKH”⁵⁷

“Waktu saya pertama kali masuk sebagai penerima PKH, saya diberitahu oleh pendamping waktu ada pertemuan di kantor kelurahan. Saya tidak tahu awalnya masuk dari mana, katanya dari data DTKS. Saya bersyukur karena bantuan ini sangat membantu untuk keperluan sekolah anak. Tapi saya juga pernah dengar ada tetangga yang lebih susah dari saya tapi belum masuk. Saya tidak tahu kenapa, mungkin belum terdata”⁵⁸

“Saya sebenarnya baru masuk PKH sekitar dua tahun lalu. Sebelumnya sudah sering tanya-tanya tapi katanya belum masuk data. Setelah ada musyawarah kelurahan, akhirnya saya diajukan masuk dan beberapa bulan kemudian saya dapat panggilan buat bikin rekening. Saya senang karena akhirnya bisa dapat bantuan juga. Tapi menurut saya, prosesnya kadang lama dan kurang jelas siapa yang menentukan masuk atau tidaknya”⁵⁹

⁵⁶ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

⁵⁷ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁵⁸ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁵⁹ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

Selanjutnya, berikut ini hasil wawancara dengan penerima manfaat di kelurahan sumpang minangae, ia menjelaskan:

“Saya itu sebenarnya tidak tau apa itu program PKH dan setelah kudengar tetangga ku yang dapat baru dia jelaskan mi apa itu PKH. Sudahnya itu saya langsung ke pak RT dan minta untuk di data juga. Sekitar ada 2 minggu Alhamdulillah datang tim pendata PKH dirumah dan ditanyanya, setelah itu dipanggil ke kantor kelurahan dan ternyata dapat ka juga bantuan PKH”⁶⁰

“Menurut saya, penetapan penerima bantuan ini kadang kurang tepat. Ada yang rumahnya bagus, punya kendaraan, tapi masih dapat bantuan. Sedangkan ada juga yang tinggal di rumah papan, tidak kerja tetap, tapi tidak terdata. Saya sendiri dapat bantuan, dan saya sangat terbantu. Tapi saya juga ingin agar pendataan itu lebih adil dan benar-benar sesuai kondisi lapangan”⁶¹

“Saya tidak terlalu paham bagaimana caranya masuk PKH. Katanya dari pusat, tapi waktu didata dulu saya hanya isi formulir dari pendamping dan diminta fotokopi KK dan KTP. Beberapa bulan kemudian dapat panggilan untuk pengambilan kartu ATM. Tapi memang, ada beberapa orang di sekitar saya yang tidak puas karena tidak terpilih, padahal kondisinya juga miskin”⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa proses penetapan dan verifikasi calon penerima bantuan PKH di kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae berbeda karena dapat dilihat bahwa kelurahan sumpang minangae penetapan penerima bantuannya masih belum merata masih ada sebagian masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan tapi belum dapat.

⁶⁰ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁶¹ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁶² Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

c. Pembukaan Rekening dan Penyaluran Dana

Langkah selanjutnya yaitu pembukaan rekening dan penyaluran dana kepada calon penerima bantuan PKH. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. Besaran keuntungan, jumlah penerima manfaat, dan lokasi penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh pengurus yang membawahi setiap transaksi.

Melalui Bank Penyalur yang melakukan penyaluran bantuan sosial PKH nontunai atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH. Nama Keluarga Penerima Manfaat PKH tersebut di atas ditarik kembali melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Mekanisme Bantuan Sosial PKH secara nontunai, ditunjukkan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara metodis sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.
2. Sebagaimana dijabarkan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH, dilakukan sosialisasi dan edukasi.
3. Distribusi Kartu Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera Kepada KPM dilakukan oleh Bank Penyalur dengan dibantu oleh pengguna media sosial, setelah memperoleh mobil KKS yang siap memulai kegiatan.
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan tersebut tanpa pengenaan biaya.

5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.
6. Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH dihitung ulang pada setiap tahapan proses atau sesuai dengan kebutuhan tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
7. Pemantauan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kemajuan penyaluran bantuan sosial PKH, sedangkan pelaporan dilakukan oleh bank BRI kepada dinas sosial.

Berikut ini adalah hasil dari wawancara dengan Kordinator PKH di kecamatan bacukiki barat, pak Samsul menjelaskan bahwa:

“Setelah calon KPM lolos verifikasi, tahap selanjutnya yaitu pembuatan rekening di bank yang telah di tetapkan, biasanya bank yang dipakai yaitu BRI atau Mandiri. Pihak bank biasanya membuka layanan jadi kami kordinator dengan kelurahan mengumpulkan warga yang berhak menerima. Calon penerima harus bawa KTP dan KK, nanti langsung dibukakan rekening dan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau biasa disebut sebagai kartu PKH. Kartu KKS ini sama dengan kartu-kartu ATM yang lainnya, setiap pencairan dana itu akan langsung masuk ke rekening masing-masing warga”⁶³

Selanjutnya, saya mewawancarai warga di Kelurahan Bumi Harapan mengenai cara pembukaan rekening hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Waktu saya diterima menjadi anggota penerima bantuan PKH, saya diarahkan untuk melakukan pembukaan rekening di Bank BRI. Selama proses pembukaan rekening ini saya didampingi oleh pendamping PKH dan saat pencairan dana saya juga merasa sangat terbantu karena uangnya bisa saya pakai untuk beli keperluan anak sekolah, kadang untuk beli susu

⁶³ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

juga. Pendamping PKH juga selalu ingatkan supaya kami pakai dana bantuan sesuai kebutuhan”⁶⁴

“Saat pertama kali saya ditetapkan sebagai penerima PKH, saya diminta mengurus pembukaan rekening di BRI. Prosesnya waktu itu saya ikut ramai-ramai ke kelurahan, dibantu sama pendamping dan membawa fotokopi KTP dan KK. Setelah itu, baru kami ambil Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Alhamdulillah semuanya lancar. Tapi untuk pencairan dana, kadang saya harus ke agen BRI Link yang jaraknya agak jauh. Kalau dana belum cair, saya harus balik lagi lain waktu. Itu yang agak repot karena biaya ojek juga lumayan.”⁶⁵

“Pembukaan rekeningnya tidak sulit, karena semua sudah diarahkan oleh pendamping. Tapi saya lihat ada juga ibu-ibu yang tidak terlalu paham soal kartu ATM, jadi kadang kartunya dikasih ke tetangganya untuk ambil uang. Saya pikir itu berisiko, tapi karena mereka tidak bisa ke agen sendiri, jadi terpaksa begitu. Untuk saya sendiri, saya simpan dan pakai sendiri. Tapi memang sebaiknya ada pelatihan sedikit tentang cara pakai ATM biar lebih aman.”⁶⁶

Selain kelurahan bumi harapan saya juga mewawancarai warga kelurahan sumpang minangae menjelaskan tentang proses pembukaan rekening, dia menjelaskan bahwa:

“Setelah diterima menjadi anggota penerima PKH, saya di ajak untuk buka rekening dan semua itu didampingi oleh pendamping PKH saya diajarkan cara menarik uang pakai kartu KKS karena saya memang belum tau cara untuk tarik uang”⁶⁷

“Waktu disuruh buka rekening, saya agak bingung karena belum pernah punya rekening bank. Tapi pendamping bantu jelaskan, jadi saya ikut prosesnya. Setelah punya kartu KKS, dana masuk tiap beberapa bulan. Saya tarik lewat agen BRI Link, tapi kadang harus antri lama. Pernah juga saya lupa PIN, jadi tidak bisa ambil uang. Untungnya dibantu juga sama

⁶⁴ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁶⁵ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁶⁶ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁶⁷ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

pendamping untuk mengurus ulang. Sekarang saya sudah lebih terbiasa.”⁶⁸

“Dulu saya sempat bingung waktu diminta buka rekening, karena saya belum pernah berurusan sama bank. Tapi sekarang saya sudah terbiasa. Masalahnya hanya saat dana lambat masuk, dan kami tidak tahu pasti jadwalnya. Saya pernah ke agen tapi dananya belum masuk, padahal sudah dapat kabar dari tetangga. Jadi kadang informasi tidak seragam. Kalau bisa, pemberitahuan lebih jelas supaya tidak bolak-balik.”⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas kita bisa lihat bahwa pembukaan rekening dan penyaluran dana PKH ini sangat mudah karena sudah di dampingi dari awal sampai akhir walaupun masih ada beberapa yang masih bingung tetapi semua itu tetap diajarkan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Tanpa mekanisme pemantauan dan penilaian yang baik, program dapat mengalami penyimpangan, salah sasaran, atau kurang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Monitoring adalah kegiatan pengamatan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program, terutama untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan standar yang ditetapkan. Dalam konteks PKH, monitoring dilakukan terhadap penyaluran dana, pelaksanaan pertemuan keluarga (P2K2), serta kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap komitmen pendidikan dan kesehatan. Sedangkan evaluasi

⁶⁸ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁶⁹ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

adalah proses penilaian terhadap hasil dan dampak dari program. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuannya, mengidentifikasi kendala dan keberhasilan, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan implementasi di masa depan.

Untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana monitoring dan evaluasi ini dilakukan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, baik dari kordinator PKH, maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seperti yang dijelaskan oleh kordinator PKH kecamatan bacukiki barat. Hasil wawancara pak samsul sebagai berikut:

“Kegiatan ini kami lakukan secara berkala, minimal satu kali setiap bulan. Karena setiap pendamping punya wilayah kerja masing-masing dan wajib memantau langsung kondisi KPM PKH. Kalau ada yang tidak aktif atau tidak memenuhi komitmen, kami sebagai kordinator akan beri teguran keras atau bahkan bisa dikeluarkan dari penerima bantuan”⁷⁰

Selanjutnya, berikut ini hasil wawancara kepada warga KPM di kelurahan bumi harapan terkait dengan tahap ini:

“Kalau kami penerima PKH, tiap bulan harus ikut pertemuan kelompok. Di situ biasanya ibu pendamping tanya-tanya tentang anak sekolah, kesehatan, dan kalau ada masalah. Kadang juga datang ke rumah langsung lihat keadaan. Pernah juga saya ditegur karena anak saya bolos sekolah. Katanya kalau tidak ikut pertemuan atau tidak penuhi aturan, bisa dikeluarkan dari program. Jadi kami memang harus aktif. Dulu waktu saya baru mau masuk, dicek juga rumah dan kondisi saya, baru bisa dapat bantuannya”⁷¹

“Selama saya ikut PKH, ada pertemuan rutin yang disebut P2K2 setiap bulan. Di situ pendamping selalu hadir, tanya perkembangan anak

⁷⁰ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

⁷¹ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

sekolah, kesehatan balita, dan pengeluaran rumah tangga. Kami juga diminta bawa bukti, seperti rapor anak atau kartu imunisasi. Saya rasa itu bagus karena kami diawasi dan dibimbing, tidak hanya diberi uang saja.”⁷²

“Pendamping PKH sering datang ke rumah atau kumpulkan kami di posyandu atau kantor kelurahan. Kadang dia tanya apa anak masih sekolah, dan apakah saya kontrol ke puskesmas. Tapi saya juga lihat ada ibu-ibu yang jarang ikut pertemuan, tapi tetap dapat bantuan”⁷³

Adapun hasil wawancara dengan warga kelurahan sumpang minangae.

Dia menjelaskan:

“Di PKH itu ada rapat, gunanya ini rapat untuk saling tanya jawab kepada pendamping tentang apapun itu, mau masalah ta di PKH, mau bertanya Kesehatan bisa semua karena tujuannya untuk saling mengajari”⁷⁴

“Dari dulu saya selalu ikut kegiatan PKH, karena takut kalau tidak ikut malah dicoret. Tapi saya juga belum pernah tahu ada petugas dari Dinas Sosial langsung datang evaluasi”⁷⁵

“Selama saya ikut PKH, saya lihat pendamping sangat aktif. Dia sering minta kami lapor soal sekolah anak, dan pernah juga minta kami kumpulkan surat keterangan”⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu bagian untuk menjaga program PKH serta memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan yang dijelaskan oleh KPM di kelurahan bumi harapan dan sumpang minangae.

⁷² Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁷³ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁷⁴ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁷⁵ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁷⁶ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

2. Faktor penting dalam Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat

Untuk mengetahui faktor penting dalam penyaluran dana bantuan PKH di kecamatan bacukiki barat penulis memberikan pertanyaan untuk 4 indikator yang telah ditetapkan. Indikator ini berupa ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program. Berikut adalah hasil wawancara tersebut:

a. Ketetapan sasaran program PKH

Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial mengenai penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat dengan golongan orang yang memang berhak menerima bantuan PKH ini. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kelurahan memberikan bantuan ini kepada masyarakat yang dilakukan secara maksimal dan sangat baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Samsul selaku kordinator PKH kecamatan bacukiki barat:

“Penyaluran dana PKH di setiap kelurahan ini sudah dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya, kalau soal efektif efisien dan tidaknya itu hal yang bisa diatasi, karena bantuan ini juga langsung dari pusat jadi yah sudah bisa saya katakan tepat sasaran, kan pkh ini juga tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat yang menerimanya”⁷⁷

Adapun penjelasan masyarakat KPM PKH di Kelurahan Bumi Harapan. Hasil wawancaranya yaitu:

“Alhamdulillah karena bisa ka dapat bantuan ini apalagi saya banyak anakku jadi bersyukur sekali bisa dapat bantuan PKH. Program ini juga sangat membantu karena banyak ibu-ibu lain yang memang hidupnya

⁷⁷ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

susah dan punya banyak anak. Saya sendiri sebagai penerima merasa sangat membantu dalam masalah ekonomi dan pasti senang dengan adanya program ini semoga PKH ini selalu ada dan tidak dihilangkan oleh pemerintah”⁷⁸

“Banyak yang terbantu dari program ini, termasuk saya. Tapi saya juga lihat masih ada warga yang lebih miskin, malah belum terdaftar. Kalau memang tujuannya untuk orang miskin, ya datanya harus selalu diperbarui. Saya kira bantuan ini belum sepenuhnya tepat sasaran”⁷⁹

“Saya pikir sudah banyak yang layak dapat bantuan dan sudah masuk. Tapi memang, ada juga yang seharusnya belum layak tapi masih tetap terima. Kalau bisa, dievaluasi tiap tahun supaya bantuan tidak salah sasaran”⁸⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa warga di kelurahan sumpang minangae. Dia menjelaskan:

“Kalau menurut saya, bantuan PKH ini belum terlalu tepat karena ada tetangga saya yang bisa dikatakan layak dapat tapi belum dapat”⁸¹

“Kalau saya pribadi merasa bersyukur dapat bantuan. Tapi saya setuju kalau masih ada yang salah sasaran. Ada warga yang sudah punya motor, penghasilan tetap, tapi masih dapat PKH. Itu seharusnya tidak boleh. Pemerintah harus lebih ketat periksa datanya.”⁸²

“Saya senang karena keluarga saya akhirnya dapat bantuan setelah didata ulang. Tapi saya tahu juga ada tetangga saya yang lebih susah tapi belum dapat. Kami bingung kenapa bisa begitu. Mungkin memang belum masuk data pusat. Jadi menurut saya, belum semua bantuan tepat sasaran.”⁸³

⁷⁸ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁷⁹ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁸⁰ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁸¹ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁸² Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁸³ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

Dari hasil wawancara di atas ditetapkan sasaran program PKH di kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae sepenuhnya masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap warga, masih ada yang seharusnya dapat tapi belum dapat. Tapi semua itu tetap harus diperhatikan oleh kordinator PKH agar pada saat pemilihan calon penerima bantuan sesuai dengan sasaran.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program PKH di kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae telah merampungkan semuanya dengan sangat baik. Sosialisasi ini dilakukan kepada KPM PKH. Tujuan dari program sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Samsul selaku Kordinator PKH, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Nah kalau soal sosialisasi ini tetap dilakukan kepada warga yang baru mau menjadi penerima bantuan PKH. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang akan menerima bantuan karena kalau tidak ada sosialisasi ini nanti kita tidak tau apakah ini warga betul-betul layak untuk dikasih bantuan atau tidak”⁸⁴

Selanjutnya berikut ini adalah hasil wawancara dengan warga Kelurahan Bumi Harapan:

“Menurut saya sosialisasinya sangat jelas. Tapi masih ada beberapa warga yang tidak datang karena tidak tahu jadwal atau tidak sempat hadir. Jadi kadang informasi tidak sampai ke semua KPM. Waktu rapat PKH juga kita diberikan materi tentang stunting, cara menjaga lingkungan

⁸⁴ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

rumah, bahayanya demam berdarah bagi anak-anak dan cara mendidik anak”⁸⁵

“Sosialisasi awal memang ada, tapi setelah itu tidak terlalu rutin. Kami kadang bingung kalau ada perubahan, seperti jadwal pencairan atau pengurangan bantuan. Harus tanya ke orang lain dulu. Saya harap ke depan ada pertemuan yang rutin supaya semua informasi disampaikan langsung”⁸⁶

“Saya pernah ikut sosialisasi di kelurahan, dijelaskan semua tentang manfaat dan kewajiban KPM. Tapi tidak semua warga bisa ikut waktu itu. Ada yang kerja atau tidak tahu jadwalnya. Jadi, menurut saya, informasi belum menyebar merata. Harusnya ada pengumuman resmi atau selebaran biar semua paham”⁸⁷

Adapun hasil wawancara dengan KPM kelurahan sumpang minangae:

“Saya ikut sosialisasi PKH waktu dinyatakan sebagai anggota PKH. Kita semua dikumpulkan di rumah warga yang menjadi tempat untuk rapat, pendamping PKH juga hadir. Disitu kita dijelaskan semua soal kartu KKS, aturan bantuan, dan komitmen yang harus dipenuhi. Jadi kami tahu bahwa ini bukan sekadar bantuan uang, tapi ada tanggung jawabnya”⁸⁸

“Dulu waktu saya mulai jadi peserta PKH, tidak banyak penjelasan yang saya terima. Hanya disuruh kumpulkan berkas dan ikut pembukaan rekening. Baru setelah itu diberi tahu bahwa harus ikut pertemuan kelompok. Saya pikir sosialisasinya kurang menyeluruh, apalagi bagi orang yang baru pertama ikut program bantuan”⁸⁹

“Kalau saya pribadi merasa cukup terbantu dengan penjelasan dari pendamping. Tapi saya juga tahu banyak yang hanya ikut-ikut tanpa tahu kenapa mereka dapat bantuan. Sosialisasinya sebaiknya diberikan bukan cuma sekali saat awal, tapi juga saat ada perubahan kebijakan”⁹⁰

⁸⁵ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁸⁶ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁸⁷ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁸⁸ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁸⁹ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁹⁰ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi program PKH di dua kelurahan ini dilaksanakan pada pertemuan di rumah-rumah warga dan di kantor kelurahan, selain itu sosialisasi juga berguna untuk mereview tujuan, hak dan kewajiban dari keluarga penerima PKH yang dilaksanakan pada saat pertemuan kelompok.

c. Tepat Waktu

Indikator selanjutnya dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas serta Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare melalui waktu yang tepat. Tepat waktu terhadap program disini berbicara mengenai ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH yang diberikan kepada seluruh masyarakat penerima bantuan pada kegiatan PKH yang dicairkan setiap empat bulan sekali. Saya mewawancarai langsung Kordinator PKH dan menjelaskan ketepatan waktu terhadap pencairan dana bantuan PKH yang dilakukan sebagai berikut:

“kalau masalah pencairan bantuan itu Alhamdulillah bisa dikatakan tepat waktu walaupun biasa pencairannya itu kadang lambat 2-5 hari karena itu semua tergantung dari pusat, tapi kita disini InsyaAllah akan usahakan untuk selalu tepat waktu dalam pemberian bantuan. pencairan dananya juga itu bisa diterima empat kali dalam satu tahun. Kami dari pendamping selalu berusaha menginformasikan lebih awal ke KPM supaya mereka tidak bingung. Begitu dana masuk, kita juga bantu pantau pencairannya, apalagi untuk lansia atau yang tinggal di daerah yang jauh dari ATM”⁹¹

⁹¹ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

Untuk mengetahui lebih jelas tentang informasi pancairan dana bantuan sudah tepat waktu saya langsung menanyakan kepada Masyarakat penerima bantuan. KPM kelurahan bumi harapan mengatakan bahwa:

“Biasanya saya terima bantuan itu tiap tiga bulan. Kadang pas waktunya, kadang juga terlambat sedikit. Pernah juga sampai menunggu 4 hari baru masuk itu uang, tapi haruski selalu sabar karena ini juga bantuan sangat membantu. Pendamping juga selalu kasih kabar lewat WA atau saat pertemuan PKH kalau bantuan sudah masuk”⁹²

“Biasanya dana cair tiga bulan sekali, tapi sering kali tidak pasti jadwalnya. Kadang kami dengar info dari tetangga atau dari grup WhatsApp”⁹³

“Kadang cair tepat waktu, kadang juga telat sampai dua minggu. Kalau tepat waktu”⁹⁴

Adapun KPM kelurahan sumpang minangae menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah tepat waktu, memang pencairan ini kadang lambat masuk kadang juga cepat masuk, tidak selalu juga pas tanggalnya. Kadang bisa 3 sampai 5 hari dari jadwal pencairannya. Tapi semua itu tetapji dikasih tauki sama pendamping dan najelaskan jki juga karena biasa ini pencairan ada memang tahapnya jadi tidak semua itu 1 hari full keluar bersamaan bantuan”⁹⁵

“Kadang dana sudah masuk tapi kami tidak dapat info. Ada yang tahu duluan, ada yang ketinggalan. Jadi yang dapat info cepat bisa langsung cair, yang lain harus tanya-tanya dulu”⁹⁶

⁹² Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁹³ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁹⁴ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

⁹⁵ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

⁹⁶ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Saya merasa bantuan PKH sangat bermanfaat, tapi pencairan dananya tidak selalu tepat waktu. Dulu pernah hampir satu bulan lebih dari jadwal”⁹⁷

Berdasarkan pendapat warga di kelurahan bumi harapan dan kelurahan sumpang minangae memang pada dasarnya bantuan ini sudah tepat waktu hanya saja biasa terjadi keterlambatan sampai beberapa hari karena terkendala dari pusat, terlebih lagi masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya program PKH ini dan bantuan yang diterima juga sudah bisa dikatakan layak dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

d. Tercapainya Tujuan

Indikator selanjutnya dalam menilai Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare adalah tercapainya tujuan program. Secara umum, suatu program atau kegiatan difokuskan pada berbagai sub tujuan yang akan dicapai, artinya terdapat berbagai tujuan dari program atau kegiatan yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi suatu kegiatan, perlu dipahami secara menyeluruh semua tujuan tersebut, baik tujuan utama maupun tujuan lainnya. Hasil wawancara dengan kordinator PKH kecamatan bacukiki barat menyatakan:

“Kalau berbicara tentang tujuan tercapainya program, secara umum PKH sudah sangat membantu masyarakat. Banyak keluarga yang tadinya kesulitan untuk menyekolahkan anaknya sekarang sudah bisa menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Ibu-ibu juga didorong untuk lebih rajin periksa ke puskesmas karena mereka harus tahu itu semua bagian dari syarat bantuan. Secara menyeluruh kita semua mempunyai

⁹⁷ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan bantuan yang ada”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa PKH di Kecamatan Bacukiki Barat mempunyai tujuan utama yaitu memberikan bantuan agar warganya selalu sejahtera dan bahagia. Untuk informasi lebih jelas saya juga mewawancarai anggota penerima PKH di kelurahan bumi harapan mengatakan:

“Kalau tercapainya tujuan menurut saya memang sepenuhnya sudah tercapai karena bisa dilihat toh dengan adanya PKH banyak warga yang tergolong dalam keluarga miskin apalagi yang tidak bisa dia kasih sekolah anaknya sekarang bisa semua mi, saya juga sebagai warga harus selalu mengikuti setiap pertemuan PKH karena disitu diajarkan semua ki bagaimana caranya mengatur uang supaya tidak boros, penjelasan tentang kesehatan dan lain-lain”⁹⁹

“Dulu saya sempat bingung bayar keperluan sekolah, tapi sekarang saya merasa terbantu. Jadi saya pikir, tujuan program ini, yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, sudah cukup tercapai”¹⁰⁰

“Saya merasa tujuan program ini sudah baik, tapi belum semua keluarga bisa memanfaatkannya dengan maksimal”¹⁰¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan KPM kelurahan sumpang minangae:

“Menurutku tercapai semua jika tujuannya PKH ke semua masyarakat dan tidak ada yang pernah gagal. Kan memang ini PKH untuk masyarakat yang membutuhkan toh dan semua warga juga pasti merasakan bantuan ini”¹⁰²

⁹⁸ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

⁹⁹ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰⁰ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰¹ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰² Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Bagi saya tujuan program ini sudah sesuai dengan yang diharapkan”¹⁰³

“Bagi keluarga seperti kami, bantuan ini sangat terasa manfaatnya. Walau nominalnya tidak besar, tapi kalau dipakai dengan benar, sangat membantu”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima merasa tujuan Program Keluarga Harapan telah tercapai, terutama dalam hal meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak mereka. Para KPM merasakan bahwa bantuan meringankan beban biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, serta mendorong kesadaran untuk memanfaatkan layanan posyandu dan puskesmas.

e. Biaya

Biaya dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pengeluaran keuangan secara langsung, tetapi juga mencakup sumber daya lain yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan, seperti waktu, tenaga, serta beban administratif yang harus ditanggung oleh penyelenggara maupun penerima manfaat. Pemahaman mengenai biaya sangat berkaitan erat dengan efisiensi, karena efisiensi pada dasarnya mengukur sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin.

Berikut ini adalah beberapa wawancara dari berbagai warga di Kelurahan Bumi Harapan:

¹⁰³ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁰⁴ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Saya tidak pernah bayar apa-apa pas dipilih jadi anggota program PKH. Tapi kadang saat mau cairkan dana dan tidak ada yang antar maka saya naik ojek ke BRI link. Jadi menurut saya, tidak ada biaya resmi, tapi tetap ada pengeluaran, terutama transportasi”¹⁰⁵

“Tidak ada biaya yang pernah saya keluarkan dalam pengurusan PKH walaupun ada pasti bukan tentang bantuan ini melainkan seperti uang transportasi saja”¹⁰⁶

“Saya tidak pernah diminta uang untuk ikut program ini. Tapi yang jadi beban itu ongkos bolak-balik ke tempat pencairan, apalagi kalau dananya belum cair”¹⁰⁷

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat penerima bantuan di kelurahan sumpang minangae:

“Bantuan PKH ini seharusnya gratis, dan memang saya tidak pernah diminta uang. Tapi saya sering keluar biaya transportasi dan kadang bayar fotokopi KTP, KK, atau rapor waktu diminta. Jadi ada biaya kecil-kecil, walaupun bukan dari pemerintah langsung”¹⁰⁸

“Saya merasa tidak terbebani biaya apa-apa untuk masuk program”¹⁰⁹

“Kalau dari sisi program, tidak ada pungutan. Apalagi saya dekat ji rumahku dari kantor kelurahan”¹¹⁰

Dari berbagai pendapat KPM di dua kelurahan, dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak ada pungutan biaya resmi dalam proses

¹⁰⁵ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰⁶ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰⁷ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁰⁸ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁰⁹ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹¹⁰ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

pendaftaran, pembukaan rekening, maupun penyaluran dana PKH. Semua KPM menyatakan bahwa program ini gratis dan difasilitasi oleh pendamping PKH, sesuai dengan prinsip perlindungan sosial pemerintah.

f. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kelancaran proses penyaluran dana serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya terbatas pada sistem perbankan digital untuk penyaluran dana, tetapi juga mencakup sistem informasi kesejahteraan sosial yang berperan dalam pengelolaan data penerima manfaat, verifikasi, serta pelaporan program.

Dalam hal penyaluran bantuan, penggunaan teknologi digital juga terlihat pada mekanisme non-tunai melalui rekening bank dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM, yang kemudian dapat dicairkan melalui mesin ATM atau agen bank (seperti BRI Link) di lingkungan tempat tinggal mereka. Penggunaan sistem perbankan ini tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan dalam distribusi dana, tetapi juga mempercepat proses pencairan dan memberikan rasa aman bagi penerima karena dana tersimpan secara digital. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama terkait rendahnya literasi digital dan keuangan sebagian KPM yang belum terbiasa dengan layanan perbankan atau teknologi kartu elektronik. Hal ini membuat sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan KKS, lupa PIN, bahkan menyerahkan kartu

kepada orang lain, yang tentu dapat berisiko. Berikut ini hasil wawancara dari beberapa warga di kelurahan bumi harapan dan sumpang minangae:

“Teknologi ini sangat membantu seluruh masyarakat karena dengan adanya teknologi semua informasi dapat lebih mudah untuk diketahui”¹¹¹

“Alhamdulillah punya HP jadi saya ikut grup WhatsApp PKH. Info-info dari pendamping sering dibagikan lewat situ”¹¹²

“Dengan adanya teknologi semua informasi lebih mudah untuk diketahui”¹¹³

“Teknologi pastinya membantu warga untuk mencari informasi”¹¹⁴

“Menurut saya teknologi sangat membantu, asal tahu cara pakainya. Saya biasa minta tolong anak saya untuk buka info di grup WhatsApp”¹¹⁵

“Kalau saya pribadi tidak teralau tau cara pakai HP, tapi untung ada WA yang gampang untuk cari informasi”¹¹⁶

“Sangat mudah untuk mendapat informasi melalui teknologi jaman sekarang”¹¹⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan PKH memberikan manfaat signifikan bagi KPM, terutama dalam akses informasi, komunikasi dengan pendamping, dan pengecekan pencairan dana. Namun, terdapat kesenjangan digital di kalangan KPM—terutama pada penerima manfaat yang berusia lebih tua, tidak memiliki smartphone, atau

¹¹¹ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

¹¹² Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹¹³ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹¹⁴ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹¹⁵ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹¹⁶ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹¹⁷ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

belum terbiasa menggunakan aplikasi perbankan dan media sosial. Sebagian KPM merasa terbantu dengan grup WhatsApp PKH dan aplikasi mobile banking, tetapi sebagian lainnya masih bergantung pada informasi lisan atau bantuan dari anggota keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan literasi digital, agar seluruh KPM bisa memanfaatkan teknologi secara merata dan optimal, sehingga efisiensi layanan PKH dapat meningkat secara menyeluruh.

g. Tingkat Kepuasan KPM

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap pelaksanaan program, khususnya dalam hal penyaluran dana bantuan. Tingkat kepuasan KPM mencerminkan sejauh mana penerima merasa terbantu secara nyata oleh program, baik dari sisi ketepatan waktu pencairan, kemudahan akses, ketepatan sasaran, hingga pemahaman terhadap tujuan program itu sendiri.

Tingkat kepuasan KPM juga dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan pendamping sosial. Bagi KPM yang merasa diperhatikan, didampingi, dan dibantu dalam memahami proses serta kewajiban mereka sebagai penerima bantuan, rasa puas cenderung lebih tinggi. Namun bagi sebagian lainnya, terutama yang jarang berinteraksi atau yang merasa tidak mendapat informasi cukup, muncul perasaan kurang puas terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan. Berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan bumi harapan:

“Saya cukup puas dengan bantuan PKH karena sangat membantu saya untuk biaya sekolah anak-anak. Walaupun nilainya tidak besar, tapi bisa

meringankan, apalagi kalau anak lagi butuh seragam atau perlengkapan sekolah”¹¹⁸

“Pastinya sudah merasa puas, dapat saja bantuan ini bukan hanya puas tapi semua warga yang membutuhkan pasti bersyukur sekali dan semoga tidak hilang ini bantuan”¹¹⁹

“Saya bersyukur jadi penerima bantuan PKH. Saya puas karena ada pendamping yang membimbing dan mendata kami dengan baik. Tapi saya berharap bantuannya bisa lebih besar atau ditambah, karena kebutuhan sekolah anak sekarang makin mahal.”¹²⁰

Selanjutnya ini adalah hasil wawancara di kelurahan sumpang minangae:

“Selama ini saya merasa sangat terbantu dan puas. Bantuan PKH membuat saya lebih disiplin dalam memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak”¹²¹

“Saya senang dapat bantuan, tapi belum sepenuhnya puas karena informasi soal pencairan kadang tidak merata. Tapi secara manfaat, ya sangat membantu keluarga”¹²²

“Kalau ditanya puas atau tidak, saya bilang puas sekali”¹²³

Dari berbagai pendapat KPM di kedua kelurahan, terlihat bahwa mayoritas penerima menyatakan puas terhadap pelaksanaan program PKH, terutama dalam hal manfaat bantuan terhadap pendidikan dan kesehatan anak.

¹¹⁸ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹¹⁹ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹²⁰ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹²¹ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹²² Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹²³ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

Banyak yang merasa terbantu secara finansial dan mengakui bahwa program ini memberi dampak positif bagi kesadaran mereka dalam mengurus keluarga.

3. Kendala Yang Muncul Dalam Proses Penyaluran Dana Bantuan PKH di Kelurahan Pada Kecamatan Bacukiki Barat

a. Ketidaktepatan Data Penerima

Proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada ketepatan data calon penerima yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketidaktepatan data dapat menyebabkan penyaluran dana tidak sampai ke pihak yang tepat atau bahkan disalurkan kepada keluarga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria. Di Kecamatan Bacukiki Barat, beberapa masalah terkait ketidaktepatan data calon penerima bantuan PKH ditemukan selama pelaksanaan program ini. Salah satu masalah utama yang menyebabkan ketidaktepatan data adalah data yang tidak terupdate. Meskipun DTKS merupakan basis data yang digunakan untuk menentukan calon penerima bantuan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga seringkali tidak segera tercatat. Berikut ini pendapat dari Kordinator PKH Kecamatan Bacukiki Barat:

“Salah satu tantangan utama dalam program ini adalah soal data. Kadang kami menemukan bahwa ada penerima PKH yang sebenarnya sudah tidak layak, misalnya ekonominya sudah meningkat atau anaknya sudah tidak sekolah lagi, tapi mereka masih menerima bantuan. Kami sudah mengusulkan untuk di kasih keluar dari anggota PKH, tapi karena pembaruan DTKS itu dari pusat jadi prosesnya tidak cepat. Akhirnya masih ada data lama yang belum tergantikan. Sebaliknya, warga yang miskin dan seharusnya dapat, justru belum masuk DTKS karena belum pernah didata. Saya juga masih sering mendapat keluhan dari beberapa warga. Bahkan ada yang heran kenapa tetangganya yang terlihat sudah mampu masih menerima bantuan, sementara dia sendiri yang benar-benar

kesusahan justru tidak dapat. Ini terjadi karena datanya belum diperbarui. Saya harap pemerintah bisa lebih adil dan memperhatikan warga yang betul-betul lebih membutuhkan”¹²⁴

Berikut hasil wawancara warga di kelurahan bumi harapan mengenai kendala ini:

“Saya pernah merasakan kendala ini yang dimana Kartu Keluarga nama anak saya tidak sesuai dengan yang dipusat jadi pihak kelurahan menyuruh saya ke dukcapil untuk memperbaiki nama anak saya yang salah, masalahnya cuma satu huruf saja yang beda tapi yah kita sebagai warga harus mendengar agar bantuan PKH ini tidak dicabut”¹²⁵

“Biasa ka rasakan hal seperti ini seperti data tidak lengkap atau nama yang tidak sesuai, biasa juga berpikir ka kalu orang yang tidak dapat bantuan itu bisa jadi dari datanya yang bermasalah”¹²⁶

“ada tetangga saya yang rumahnya bagus, anaknya sudah tamat sekolah, tapi masih dapat bantuan. Sementara ada yang rumahnya jauh lebih sederhana dan masih punya anak sekolah, tapi belum masuk data”¹²⁷

Selain kelurahan bumi harapan, hal ini juga pernah dirasakan oleh warga di kelurahan sumpang minangae:

“Pernah saya rasa dan pasti ribet sekali, inimi masalah yang selalu timbul dalam PKH. Nama saja salah satu huruf tidak bakal cairmi bantuan ta sebelum diganti jadi kadang bikin repot”¹²⁸

“Di lingkungan saya, ada yang kondisi ekonominya lebih baik tapi tetap dapat bantuan. Sementara saya baru ka dapat tahun lalu, padahal lama mi sudah kuajukan”¹²⁹

¹²⁴ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

¹²⁵ Rasna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹²⁶ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹²⁷ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹²⁸ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹²⁹ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Pendataan tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada yang sudah mampu, punya usaha sendiri, tapi masih dapat PKH. Dan saya harap semoga kalau pendataannya dilakukan lebih ketat lagi agar ini bantuan betul-betul untuk orang miskin”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita bisa tahu dari beberapa pendapat KPM antara Kelurahan Bumi Harapan dan Sumpang Minangae, dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan data penerima PKH masih menjadi permasalahan nyata di lapangan. Banyak warga mengaku mengetahui kasus penerima bantuan yang secara ekonomi sudah tergolong mampu, atau sudah tidak memenuhi kriteria, namun tetap terdaftar sebagai penerima aktif. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat dalam daftar penerima karena belum masuk basis data (DTKS) atau belum pernah diusulkan.

b. Kesulitan Akses Layanan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang bertujuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun telah membawa dampak positif di banyak daerah, implementasi PKH tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah kesulitan akses layanan bantuan, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terpencil, padat, atau kurang memiliki infrastruktur pendukung. Adapun pendapat dari Kordinator PKH terkait dengan masalah ini:

¹³⁰ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Masalah akses layanan memang masih jadi kendala, apalagi bagi KPM yang tinggal jauh dari kelurahan atau tempat pencairan dana. Masih banyak saya lihat warga yang naik ojek atau jalan kaki cukup jauh hanya untuk mencairkan bantuan. Masalah lainnya kalau ATM rusak atau gangguan jaringan. Belum lagi bagi yang lupa password kartu KKSnya yang menjadi kendala tambahan”¹³¹

Selain pak Samsul terdapat juga keluhan dari warga kelurahan bumi harapan, dia menjelaskan bahwa:

“Saya sebenarnya kurang tahu cara menarik uang, jadi kalau mau ambil uang, saya minta tolong sama anak saya. Kadang juga ada info dari WA kalau pencairan dana sudah bisa diambil lalu saya pergi untuk ambil itu uang ternyata belum keluar, belum lagi tempat penarikannya lumayan jauh”¹³²

“Biasa terkendala saat antri di ATM apalagi kalau serentak semua keluar bantuan banyak sekali orang pergi menarik”¹³³

“Saya kesulitan kalau harus ke puskesmas atau posyandu karena jaraknya jauh dan saya harus antar anak sendiri”¹³⁴

Warga di kelurahan sumpang minangae menjelaskan bahwa:

“Iya saya kadang terkendala dibagian kendaraan, motor disini juga dipakai oleh suami pergi kerja dan dipakai anak ke sekolah jadi kalau mau ambil uang itu harus menunggu anak pulang dari sekolah karena kalau naik ojek pakai uang lagi”¹³⁵

¹³¹ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

¹³² Rasna, Penerima Bantuan PKH, Kelurahan Bumi Harapan, 12 Juni 2025

¹³³ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹³⁴ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹³⁵ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

“Masalah utama saya adalah akses informasi. Saya tidak aktif di grup WhatsApp dan tidak semua pendamping bisa hubungi satu-satu. Kadang saya tahu info telat, padahal jadwal pencairan sudah lewat. Jadi kami yang tidak punya HP pintar agak tertinggal”¹³⁶

“Ada kalanya kami harus antre lama, padahal datang pagi-pagi. Kalau lambat, kami tidak dapat giliran. Pernah juga jaringan di agen bermasalah, jadi dana tidak bisa ditarik”¹³⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa kendala akses juga sangat berpengaruh bagi seluruh warga penerima bantuan PKH mulai dari kendaraan yang kurang, jarak dari rumah ke ATM, dan masih banyaknya warga yang jalan kaki ketika ingin rapat di pertemuan PKH.

c. Keterlambatan Pencairan Dana

Salah satu penyebab utama keterlambatan pencairan adalah kemajuan teknologi yang terus menerus, baik dari Sistem Informasi Kementerian Sosial maupun dari bank penyalur. Proses tertentu, seperti sinkronisasi data, verifikasi penerima ulang, atau gangguan pada sistem aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation), dapat menghambat proses transfer data nasional. Selain itu, prosedur administratif seperti pembuatan KPM baru atau pendataan membutuhkan waktu yang lama, yang berdampak jangka panjang terhadap pencairan.

Meskipun media sosial PKH tingkat kelurahan dan kecamatan telah berhasil memberikan informasi dan klarifikasi kepada KPM terkait kemungkinan keterlambatan, namun belum semua penerima menerima informasi secara jelas dan ringkas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,

¹³⁶ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹³⁷ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

seperti menurunnya media komunikasi, ketidakaktifan sebagian anggota kelompok, atau kesulitan mengakses informasi digital. Akibatnya, muncul keresahan dan kabut asap di masyarakat umum, yang akhirnya menimbulkan anggapan negatif terhadap program itu sendiri.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada Kordinator PKH terkait dengan keterlambatan pencairan dana:

“Penyebab keterlambatan biasanya karena proses data antara pusat dan bank penyalur. Jika ada data yang belum sinkron, misalnya data penerima berubah atau ada komponen keluarga yang sudah tidak aktif, sistem akan menahan sementara pencairan sambil menunggu validasi. Kami juga menghadapi situasi di mana sistem aplikasi SIKS-NG mengalami pembaruan atau gangguan teknis, yang berdampak pada tertundanya proses transfer dana ke rekening KPM. Tapi ini jarang terjadi, dan kami selalu upayakan untuk menyampaikan informasi secara cepat ke penerima. Kalau dari kami di lapangan, tugas utama saat ada keterlambatan adalah memastikan KPM tetap tenang dan paham bahwa dana tidak hilang, hanya tertunda. Biasanya kami sampaikan lewat pertemuan kelompok atau koordinasi lewat RT dan kelurahan. Yang perlu digarisbawahi adalah dana PKH tetap akan cair, hanya waktunya yang bisa sedikit berubah. Kami juga berharap dari pihak KPM bisa lebih sabar, karena pendamping di lapangan tidak memiliki wewenang dalam proses pencairan itu sendiri”¹³⁸

Selain Korkot PKH saya pastinya menanyakan ke masyarakat penerima bantuan di kelurahan bumi harapan dan menanyakan pendapatnya tentang pencairan dana yang biasa dialami:

“Pendapat saya tentang keterlambatan pencairan itu sebenarnya hal yang mungkin semua warga juga kadang merasa kecewa, saya sendiri saja biasa pencairannya itu bisa sampai 2 minggu dan pastinya untuk kita sebagai warga bertanya-tanya kenapa sampai selama itu pencairannya.

¹³⁸ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

Biasa juga saya lihat di grup WA ada warga yang duluan cair dan kadang terjadi tanda tanya dan menanyakan semua itu ke pendamping PKH, keterlambatan ini jadi masalah yang sangat serius bagi kami penerima PKH. Namun, kita juga sebagai warga harusnya bersikap sabar karena pasti juga pihak penyalur sudah berusaha untuk selalu tepat waktu dalam pencairan”¹³⁹

“Biasa saya lambat masuk dana sekitar 3-5 hari dan tidak selalu ji begitu dan kita sudah diajari juga sama pendamping di grup kalau lambat masuk uang sabar saja”¹⁴⁰

“Selama jadi anggota PKH tetap dirasakan hal ini karena penerima bantuan juga banyak sekali jadi otomatis pengelola juga ada rasa capeknya”¹⁴¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan KPM kelurahan sumpang minangae. Dia menjelaskan:

“Saya pribadi juga pasti pernah merasakan terlambatnya masuk dana, kalau saya kadang bisa sampai 5 hari. Kadang juga saya dengar kabar pencairan itu dari ibu-ibu lain”¹⁴²

“Pernah tiga kali saya ke agen BRI Link tapi dana belum cair”¹⁴³

“Saya merasa kecewa karena tidak ada kejelasan kapan dana akan masuk. Kadang sudah diumumkan di grup WhatsApp bahwa pencairan mulai, tapi ternyata belum bisa ditarik”¹⁴⁴

¹³⁹ Rasna, Penerima Bantuan PKH, Kelurahan Bumi Harapan, 12 Juni 2025

¹⁴⁰ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁴¹ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁴² Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁴³ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁴⁴ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana juga menjadi masalah serius bagi setiap warga KPM PKH, meskipun pencairan dananya membutuhkan waktunya yang cukup lama tetapi semua itu tetap diusahakan. Sebagian besar KPM memahami bahwa keterlambatan bukan berasal dari pihak pendamping atau kelurahan, melainkan karena adanya kendala di tingkat pusat atau teknis pada sistem bank penyalur. Namun, mereka tetap berharap agar pencairan dana dapat dilakukan lebih tepat waktu agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

d. Minimnya Literasi Keuangan KPM

Kurangnya literasi tentang keuangan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan dan efektivitas program dimaksud. Meskipun tujuan PKH bukan hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perubahan ekonomi, masih banyak penerima yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola dana yang diterimanya. Kurangnya transparansi ini disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap dari lembaga penyelenggara, tetapi juga akibat dari menurunnya standar pendidikan, kesulitan keuangan, dan minimnya akses terhadap sumber daya pendidikan yang relevan di lingkungannya.

Salah satu penerima manfaat terbesar PKH adalah sekelompok orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang menurun dengan tingkat pendidikan yang juga mencerminkan penurunan tersebut. Banyak dari mereka yang belum pernah menggunakan layanan keuangan formal sebelumnya, seperti

perbankan, menggunakan ATM, atau melaksanakan tangga rumah tangga dengan bantuan izin jangka panjang atau jangka pendek. Ketika kita pertama kali menerima PKH melalui rekening bank dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kita tidak sepenuhnya memahami cara mengakses uang tersebut, cara melindungi PIN di ATM, atau bahkan cara mengizinkan orang lain melakukan pencairan dana. Hal ini menimbulkan risiko, seperti kebocoran informasi pribadi, penggunaan data yang tidak sah oleh pihak ketiga, atau serangan bantuan yang tidak dapat diandalkan.

Berikut adalah hasil wawancara kepada kordinator PKH kecamatan bacukiki barat sebagai berikut:

“Masalah ini memang masih cukup memprihatinkan bagi penerima PKH. Banyak dari KPM kita yang belum terbiasa mengelola uang dalam jumlah tetap, apalagi melalui sistem perbankan. Kami sering menemukan ibu-ibu yang tidak tahu cara menggunakan kartu ATM, lupa PIN, atau bahkan menyerahkan kartu mereka ke orang lain karena tidak percaya diri menggunakannya sendiri. Kami juga sudah lakukan edukasi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), di situ kami jelaskan pentingnya tidak boros dalam pemakaian uang, bisa mengatur keuangan, mengenal kebutuhan primer dan sekunder, serta menghindari penggunaan dana bantuan untuk hal-hal yang tidak penting”¹⁴⁵

Selanjutnya wawancara bagi penerima PKH yang ada di kelurahan bumi harapan menjelaskan bahwa:

“Kadang kalau cair mi bantuan itu kubelikan mi kebutuhan pokok untuk dirumah seperti beras yang utama dan lain sebagainya. Tidak langsung juga dihabiskan tapi pasti ada itu saat yang betul-betul kepepet jadi disitu biasa cepat habis dana PKH”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

¹⁴⁶ Rasna, Penerima Bantuan PKH, Kelurahan Bumi Harapan, 12 Juni 2025

“Saya kan tidak kutau caranya itu pergi tarik uang apalagi yang kayak ATM jadi biasa sama ji anak untuk temanika”¹⁴⁷

“Kalau saya tidak masalah karena masih ditau, yang jadi masalah itu yang kayak orang tua yang sudah berumur kodong pati minta tolong ji di keluarganya”¹⁴⁸

Hasil wawancara dengan warga di kelurahan sumpang minangae yang menjelaskan bahwa:

“Biasa memang langsung dihabiskan apalagi kita ini para ibu-ibu pasti banyak pengeluaran untuk kebutuhan di rumah, kadang juga berpikiran tidak apa-apaji kalau dihabiskan karena masih adaji gajinya suami bisa dipakai, yang jelas lengkap dulu kebutuhan”¹⁴⁹

“Pasti semua ibu-ibu tidak dia pikirkan karena kalau cairmi dana lebih ke nabelanjakan untuk kebutuhan pokok, mungkin adaji sebagian ibu yang dia simpan uangnya untuk dipakai jaga-jaga”¹⁵⁰

“Biasa ji saya gunakan untuk keperluan anak sekolah dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari”¹⁵¹

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa minimnya literasi keuangan KPM merupakan kendala nyata dalam pelaksanaan PKH. Banyak penerima manfaat belum memiliki pemahaman dasar tentang manajemen keuangan, seperti membedakan kebutuhan utama dan keinginan, menyimpan dana, atau mengelola kartu ATM secara aman. Hal ini berdampak pada

¹⁴⁷ Nasrah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁴⁸ Pina, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Bumi Harapan. 12 Juni 2025

¹⁴⁹ Sarpia, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁵⁰ Nurhasanah, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

¹⁵¹ Muna, Penerima Bantuan PKH. Kelurahan Sumpang Minangae. 12 Juni 2025

penggunaan bantuan yang kurang tepat sasaran dan rentan terhadap penyalahgunaan.

e. Kurangnya Jumlah Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah seseorang yang selalu ada di saat ada masalah yang terjadi di setiap kelurahan. Kurangnya pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program di beberapa daerah, termasuk Kecamatan Bacukiki Barat dan Kota Parepare. Pendamping PKH merupakan pelaksana program di lapangan. Mereka memiliki tugas yang sangat penting, seperti membantu pendataan dan verifikasi calon penerima, melakukan sosialisasi program, memantau pemenuhan kewajiban penerima, bahkan menjadi penghubung antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan instansi dan organisasi pemerintah terkait. Namun pada kenyataannya, jumlah pendamping media sosial yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah KPM yang harus dipatuhi.

Jumlah pendamping juga berdampak langsung pada kualitas validasi dan verifikasi data. Pendamping sangat ingin memastikan bahwa penerima benar-benar dapat dipercaya dan memenuhi persyaratan, tetapi karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, proses verifikasi sering kali tidak sebaik yang diharapkan. Hal ini menyebabkan masalah ketidaktepatan penerima data, di mana secara umum diakui bahwa sebagian orang tidak mau menerima uang, sementara yang lain sangat membutuhkannya. Selain itu, karena pendamping tidak selalu dilakukan secara rutin, mereka juga tidak segera menanggapi

permintaan atau pertanyaan dari KPM, yang mengarah pada kesimpulan bahwa pengelolaan program ini tidak terlalu bertanggung jawab.

Dalam jangka waktu yang panjang, jumlah pendamping PKH dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi keberlangsungan program. Jika masalah ini tidak segera diatasi, tujuan utama PKH untuk menekan angka kemiskinan dan membentuk kelompok yang lebih mandiri akan sulit tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan kabupaten/kota perlu melakukan penilaian dan penyesuaian jumlah tenaga pendamping sesuai dengan jumlah KPM di setiap daerah. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan pendamping yang ada perlu diperkuat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meskipun sulit.

Berikut ini pendapat yang disampaikan dari kordinator PKH kecamatan bacukiki barat sebagai berikut:

“Persoalan kurangnya pendamping itu memang sebuah masalah, tapi untuk kecamatan bacukiki barat Alhamdulillah tidak kekurangan dalam jumlah pendamping PKH, kita usahakan juga cari pendamping yang masih muda biar kuat-kuat bawa materi dan pergi sosialisasi”¹⁵²

Dari pendapat yang disampaikan kordinator PKH di atas bisa kita ketahui bahwa untuk kecamatan bacukiki barat tidak kekurangan pendamping dan itu menjadi hal positif bagi setiap kelurahan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat?

¹⁵² Samsul, Korkot PKH. Kecamatan Bacukiki Barat. 2 Juni 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan bacukiki barat mulai dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 2014, ditandai dengan mulai terbentuknya struktur pendamping sosial di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta ditetapkannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data dari DTKS (dulu disebut BDT – Basis Data Terpadu). Pada fase awal, jumlah penerima PKH di Bacukiki Barat masih terbatas dan hanya mencakup sebagian kecil keluarga miskin yang memenuhi kriteria seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas berat, atau lansia.

Mekanisme penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan melalui suatu proses yang diawali dengan tahap pendataan dan diakhiri dengan tahap pencairan dana kepada kelompok penerima manfaat. Proses ini diawali dengan identifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh pendata PKH yang mendatangi setiap rumah-rumah untuk kemudian diminta keterangan seperti kelurahan atau, kemudian data tersebut dihimpun dan dianalisa untuk disajikan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Sosial sebagai acuan bagi kelompok yang bersedia menerima bantuan keuangan. Setelah ditetapkan sebagai penerima PKH, kelompok tersebut akan memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai alat untuk menangani pembayaran.

Setelah bantuan tersebut diberikan, langkah selanjutnya adalah pembentukan rekening oleh lembaga penyalur bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, atau BTN. Setiap orang akan diberikan nama pribadi dan akses ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai alat untuk menarik uang melalui ATM

atau secara diam-diam di cabang bank. Dalam proses ini, tenaga pendamping PKH menjalankan tugas penting untuk mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka memahami peran KKS dan cara mengelola uang secara mandiri.

Setelah rekening dan kartu KKS diberikan, bantuan akan mulai disalurkan secara adil sekitar empat kali dalam satu tahun. Penyaluran dana dilakukan secara diam-diam di setiap rekening KPM sesuai dengan jumlah bantuan yang telah ditetapkan berdasarkan komponen yang dimiliki kelompok tersebut. Misalnya, kelompok masyarakat yang memiliki anak usia sekolah akan menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak tersebut, sedangkan kelompok masyarakat yang memiliki orang tua atau wali juga akan menerima bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jadwal pencairan dana ditetapkan oleh pemerintah dan dikomunikasikan kepada KPM melalui PKH dan penyalur bank.

Selanjutnya, Pendamping PKH di Kecamatan Bacukiki Barat memiliki tanggung jawab untuk memantau dan menilai penggunaan dana setelah dana tersebut dicairkan ke masing-masing penerima. Pendamping akan mengunjungi rumah-rumah penerima untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan keluarga yang mendukung keluarga sejahtera.

Seluruh proses mekanisme penyaluran dana bantuan ini diawasi oleh Kementerian Sosial dan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan akhirnya, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan akses mereka terhadap layanan

pendidikan dan kesehatan, serta mengarahkan perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif. Pelaksanaan mekanisme penyaluran ini di Kecamatan Bacukiki Barat sendiri secara umum telah berjalan sesuai dengan standar nasional, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti entri data, pencairan karena rendahnya tingkat literasi penerima, dan masih sedikitnya sanksi sosial yang ada di beberapa kelurahan. Namun demikian, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan manajemen waktu melalui koordinasi sektoral sehingga penyaluran dana PKH dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan PKH itu memiliki empat tahap yaitu:

2. Faktor-faktor penting dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat?

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat, terlihat bahwa program ini berhasil dalam proses penyaluran dana dengan baik secara efektif dan efisien. Salah satu faktor terpenting adalah kualitas data yang dijadikan dasar dalam proses penyaluran. Ketepatan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat penting karena akan berdampak pada masyarakat penerima bantuan. Apabila data tidak akurat atau tidak disajikan secara jelas, besar kemungkinan akan terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran, baik bagi anggota kelompok yang memang belum bisa menerima bantuan maupun bagi anggota kelompok yang memang benar-benar membutuhkan.

Selain data, kinerja pendamping juga menjadi faktor sangat penting dalam memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Pendamping tidak hanya

terbatas pada pencegahan penggunaan bantuan secara teknis, tetapi juga mencakup pemantauan dan edukasi terkait penggunaan dana. Karena wilayahnya cukup luas dibandingkan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maka diperlukan pemantauan dan pengawasan yang intensif untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Akibatnya, pendamping di Kecamatan Bacukiki Barat cukup rendah. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pada lima aspek faktor penting penyaluran dana yaitu:

a. Ketetapan sasaran program PKH

Tepat sasaran merupakan salah satu indikator terpenting untuk menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH), karena menunjukkan seberapa banyak uang yang dibelanjakan oleh individu atau kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, konsep tepat sasaran berarti bahwa orang yang menerima manfaat dari program tersebut adalah mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan dan keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga mengikuti aturan untuk mendapatkan uang berdasarkan keadaan sosial serta ekonomi mereka. Tujuan dari program PKH adalah untuk memberikan dukungan kepada keluarga dengan anak-anak yang memiliki komponen kesehatan dan pendidikan, seperti orang tua, wali, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, atau orang tua lanjut usia.

Sasaran yang tepat dalam program PKH tidak hanya tentang siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga tentang bagaimana bantuan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan antar generasi. Bantuan PKH bersifat bersyarat, yang berarti KPM diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti

memastikan anak-anak bersekolah, mengajari mereka untuk bersikap sopan, dan meningkatkan kesehatan orang tua mereka.

Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program PKH dalam jangka panjang. Untuk itu, diperlukan kerja sama dari semua baik pemerintah daerah, dinas sosial, masyarakat umum, maupun masyarakat sendiri, agar integritas data tetap terjaga, sistem pengelolaannya semakin kuat, dan masyarakat mampu membangun masyarakat yang mampu memberikan pelayanan paling mendasar bagi anggota keluarganya dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara nyata.

b. Sosialisasi program

Salah satu faktor terpenting dalam mencapai suatu program atau kebijakan Pemerintah adalah sosialisasi. Sosialisasi tidak dapat dijelaskan dengan partisipasi massa. Partisipasi masyarakat dalam proses di mana masyarakat menyampaikan tujuan mereka dan melakukan tindakan-tindakan tertentu mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hukum yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada dasarnya, sosialisasi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memecahkan suatu masalah yang telah diajukan oleh pemerintah. Kontribusi masyarakat ini sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan kebijakan, seperti desakan, keterlibatan kebijakan perencanaan, dukungan atas kebijakan, dan sukerela aksi-aksi di lapangan.

Jika dikaitkan dengan PKH, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi PKH akan berdampak pada kemauan masyarakat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui PKH. Ada beberapa

jenis partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi emansipatoris, kemitraan, konsultatif, dan informatif.

c. Tepat waktu

Bagi penerima PKH, ketepatan waktu dalam pencairan dana merupakan hal yang cukup penting. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial diberikan kepada seluruh penerima PKH setiap tiga bulan. Pencairan dana PKH dilakukan dengan cara mengirimkan uang dari bank ke rekening masing-masing nasabah PKH sehingga setiap nasabah PKH dapat menarik uangnya sendiri dari ATM. Dalam pencairan PKH, ketepatan waktu sangatlah penting. Pengingat bantuan sosial harus sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati dan sudah sesuai dengan yang sedang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat.

d. Tercapainya tujuan

Tujuan program dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu sasaran program harapan adalah meningkatkan tingkat aksesibilitas terhadap dukungan pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota keluarga.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa selama pelaksanaan Program Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat, peserta dana PKH dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai uang tunai tanpa potongan dan pangan yang layak bagi peserta PKH. Di bidang pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, upaya peningkatan kualitas hidup seluruh warga Bacukiki Barat telah berjalan dengan baik sesuai dengan fasilitas kesehatan yang telah

dilaksanakan selama satu bulan setiap tahun. Selain itu, pendidikan pendamping berguna dalam membuat materi pendidikan bagi siswa agar tidak terlalu bergantung pada sekolah. Kemudian melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2). P2K2 itu merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada peserta PKH. Tujuan P2k2 yaitu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga.

e. Biaya

Biaya dalam konteks penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem distribusi bantuan yang adil, efisien, dan tepat sasaran. Meskipun dana PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersifat bantuan sosial dan tidak dikenakan biaya secara langsung, namun dalam proses pelaksanaannya tetap mengandung berbagai komponen biaya, baik yang ditanggung oleh penyelenggara maupun yang dirasakan secara tidak langsung oleh penerima manfaat.

Ketika pemerintah menyalurkan dana PKH, anggaran mencakup sejumlah biaya yang sangat penting namun sering luput dari perhatian publik: mulai dari biaya administrasi sistem SIKS-NG, pelatihan dan remunerasi bagi pendamping sosial, hingga biaya kerja sama dengan lembaga perbankan untuk pembukaan rekening dan pengelolaan KKS. Semua itu merupakan investasi yang diperlukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar, aman, dan transparan.

Dalam mengukur efisiensi penyaluran bantuan, aspek biaya menjadi sangat penting. Jika sistem penyaluran justru menimbulkan beban tambahan bagi penerima atau membutuhkan biaya besar di tingkat pelaksana tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal, maka sistem tersebut belum dapat dikatakan efisien. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, bukan menambah kesulitan dalam bentuk biaya tersembunyi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap biaya yang timbul dalam proses penyaluran perlu dilakukan secara berkala, agar distribusi bantuan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga hemat sumber daya serta mudah diakses oleh semua penerima manfaat, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

f. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi program secara keseluruhan. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterjangkauan layanan kepada masyarakat penerima bantuan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga terlihat dari mekanisme penyaluran dana bantuan yang dilakukan secara non-tunai melalui kerja sama dengan perbankan, khususnya bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat dan dapat diakses melalui Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS). Model penyaluran ini tidak hanya meningkatkan keamanan distribusi dana, tetapi juga meminimalkan kontak langsung dan potensi penyalahgunaan dana oleh pihak ketiga. Bahkan di banyak daerah, termasuk di Kecamatan Bacukiki Barat, pencairan dilakukan melalui agen BRI Link, yang menjadi perpanjangan tangan bank di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur perbankan.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam penyaluran dana PKH bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Teknologi mendekatkan layanan pemerintah kepada rakyat, mempercepat proses distribusi bantuan, serta mengurangi potensi penyimpangan. Namun teknologi juga harus terus dikembangkan secara adaptif dan inklusif, agar tidak menciptakan kesenjangan baru di kalangan penerima manfaat yang belum sepenuhnya siap secara literasi digital maupun sosial.

g. Tingkat Kepuasan KPM

Tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa bahwa hak mereka sebagai penerima bantuan telah terpenuhi secara layak dan sesuai harapan. Kepuasan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi program, karena mencakup penilaian penerima terhadap berbagai aspek mulai dari kejelasan prosedur, ketepatan waktu pencairan, kenyamanan dalam proses penyaluran, hingga manfaat yang benar-benar mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepuasan KPM juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Ketika mereka melihat bahwa ada warga lain yang tidak tergolong miskin namun tetap menerima bantuan, sementara keluarga miskin lainnya justru tidak terdaftar, maka akan muncul rasa ketidakadilan yang berdampak pada kepuasan mereka terhadap sistem. Hal ini berkaitan erat dengan akurasi data dalam penetapan penerima, yang jika tidak diperbarui secara berkala akan menimbulkan ketegangan sosial dan penurunan kepercayaan terhadap keabsahan program.

Namun demikian, tidak semua penerima merasakan tingkat kepuasan yang sama. Ada pula KPM yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana yang kerap terjadi tanpa pemberitahuan yang pasti. Ketika dana tidak cair sesuai jadwal, sebagian penerima terpaksa harus bolak-balik ke agen penyalur hanya untuk mengecek saldo, yang menimbulkan rasa kecewa dan lelah secara psikologis maupun finansial. Selain itu, terdapat masalah seperti tidak meratanya informasi dari pendamping PKH, sehingga beberapa KPM merasa kurang mendapat penjelasan atau pendampingan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka. Kondisi ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelolaan program.

3. Kendala apa saja yang sering muncul dalam proses Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan yang ada pada Kecamatan Bacukiki Barat?

Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan yang ada di kecamatan bacukiki barat, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dan mempengaruhi efektivitas dan kelancaran program. Hal

ini meliputi aspek teknis, administratif, dan sosial, serta dampak jangka panjang terhadap KPM dan dampak sosial di tempat kerja.

Salah satu kendala utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan PKH di kelurahan adalah terlambatnya pencairan bantuan dana. Meskipun jadwal pencairan telah ditetapkan secara tepat untuk setiap triwulan, dalam praktiknya tidak selalu cair sesuai dengan waktu yang diharapkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh gangguan sistem, proses ulang data KPM yang divalidasi oleh pengguna, atau adanya pembaruan sistem aplikasi seperti SIKS-NG. Akibatnya, KPM sering kali mendorong lebih banyak orang untuk menerima insentif; mungkin beberapa dari mereka dapat menghubungi lembaga BRI Link untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini, yang akhirnya mengakibatkan keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat umum.

Selain itu, ketidaktepatan data penerima KPM PKH merupakan kendala yang cukup sering muncul. Dalam beberapa kasus di kelurahan bumi harapan, masyarakat umum mengetahui adanya orang yang mampu secara ekonomi tetapi belum memiliki rekening bank, sementara warga yang betul-betul membutuhkan namanya tidak terdaftar di dalam program. Hal ini sering terjadi akibat kesalahan dalam pemutakhiran data DTKS dan verifikasi lapangan oleh pendamping karena tuntutan pekerjaan yang tinggi.

Kendala berikutnya adalah minimnya literasi masyarakat KPM. Masih banyak penerima manfaat yang belum memahami cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum mengetahui cara mentransfer dana yang telah disetorkan, bahkan mungkin memberikan ATM kepada pihak lain karena ragu atau tidak percaya diri saat menggunakannya. Akibat dari pemahaman tersebut

adalah potensi penyalahgunaan, potensi kerugian bagi orang lain, dan penggunaan bantuan dana tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya yaitu kurangnya jumlah pendamping PKH merupakan kendala tersendiri. Salah satu pendamping di Bacukiki Barat mampu menjelaskan KPM yang ada di beberapa kelurahan. Kondisi ini mempersulit pelaksanaan pemeliharaan rutin, seperti melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi KPM, dan kunjungan rumah. Akibatnya komunikasi dengan kelompok penerima tidak berjalan sesuai rencana. Contoh kasus yang terjadi di kelurahan cappagalung yang dimana kelurahan tersebut kekurangan dalam jumlah pendamping PKH, akhirnya kebanyakan KPM yang ada di kelurahan tersebut mengalami kesulitan terkait dengan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa, kendala-kendala yang terjadi di setiap kelurahan kecamatan bacukiki barat telah terlaksana dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat miskin, namun pelaksanaannya selama ini masih menemui berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah daerah maupun daerah. Solusi seperti peningkatan kapasitas pendamping, pemutakhiran data secara berkala, intensifikasi edukasi keuangan, dan penguatan sistem lintas lembaga sangat penting agar PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat dapat dilihat bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmah Muin di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tahun

2020 yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerimaan Bantuan di Desa Laliko Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat telah berjalan sesuai prosedur dan memberikan manfaat nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan data penerima, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya jumlah pendamping PKH. Temuan-temuan ini dapat dijelaskan dan diperkuat melalui teori-teori yang telah digunakan dalam penelitian, yaitu teori efektivitas, efisiensi, dan penyaluran dana PKH. Dengan demikian, kajian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hal ini tetap memerlukan sisi pemberdayaan dan pendampingan untuk memastikan bahwa tujuan program, yaitu kemandirian dan penerima manfaat dapat tercapai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan tentang analisis efektivitas dan efisiensi penyaluran dana bantuan program keluarga harapan kecamatan bacukiki barat kota parepare, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana bantuan di kecamatan bacukiki barat dan kecamatan sumpang minangae

Penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat dan sumpang minangae telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai prosedur. Mekanisme penyaluran juga dimulai dari proses pendataan dan verifikasi oleh pendamping lapangan, dilanjutkan dengan penetapan peserta, pembukaan rekening melalui bank penyalur, penyaluran dana, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Proses ini juga melibatkan koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan pendamping PKH.

2. Faktor penting dalam penyaluran dana PKH

Efektivitas dan efisiensi penyaluran dana PKH dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni:

- a) Ketetapan sasaran, dimana bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- b) Sosialisasi program, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami tujuan dan tata cara program.
- c) Ketetapan waktu pencairan, meskipun kadang masih ada keterlambatan dalam proses pencairan selama 2-5 hari tapi pada dasarnya tetap terkendali.
- d) Tercapainya tujuan, artinya terdapat berbagai tujuan dari program atau kegiatan yang diharapkan selalu tercapai.
- e) Biaya, yang dimana ini menjadi pengeluaran setiap orang.
- f) Pemanfaatan Teknologi, adanya teknologi yang membantu untuk mengetahui informasi tentang pencairan dana bantuan.
- g) Tingkat Kepuasan KPM.

3. Kendala dalam proses penyaluran dana PKH

Adapun kendala yang biasa dirasakan oleh warga penerima bantuan PKH sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan data penerima, hal ini terjadi karena KTP dan KK calon penerima tidak sesuai dengan yang terdaftar di DTKS.
2. Kesulitan akses layanan, biasanya penerima bantuan terkendala dengan alat transportasi.
3. Keterlambatan pencairan dana, hal ini disebabkan oleh kendala administratif dari pusat.
4. Minimnya literasi keuangan KPM
5. Kurangnya jumlah pendamping PKH, hal ini dapat menyebabkan sebagian para calon penerima mengalami keterlambatan saat ingin didata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan dinas sosial parepare Diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan pusat agar proses pencairan dana bantuan PKH bisa lebih tepat waktu, serta memperkuat sistem verifikasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai data terbaru.
2. Untuk pendamping PKH
Perlu peningkatan jumlah tenaga pendamping di setiap kelurahan, khususnya pada kelurahan yang memiliki jumlah KPM terbanyak. Selain itu, pelatihan berkelanjutan perlu diberikan agar pendamping mampu memberikan edukasi keuangan dan pemahaman program secara optimal kepada KPM.
3. Untuk keluarga penerima manfaat
Disarankan agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2), serta menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan pokok yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. Untuk peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji program bantuan sosial lainnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan menambahkan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak PKH terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Baqarah dan Terjemahannya dengan Transliterasi.

Abizal, Nova, Maimun, and Yulindawati. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya).” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 55–70. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>.

Arwin, et.al, “Program Keluarga Harapan dalam mendukung taraf hidup masyarakat: Kajian implementasi di Parepare”. 2021.

Azkari Zakaria et, al., “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research and Development” (sulawesi tenggara, 2020).

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif,(Jakarta, 2005).

DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.” *Pemerintahan Daerah*, 1999.

Darmawan, “Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan” (Yogyakarta, 2020).

Darwis. *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*. Kota Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Dian Purwanti, “Efektivitas perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru” (Sumatera Barat: cv aska pustaka, 2022).

Damirah Muhlis, “Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kjks Bmt Al Markaz Al Islami Makassar,” *Iqtishaduna* Vol. 10 (2019).

Elia, Fitri Aningsih. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika.” *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)* 5, no. 1 (2021): 15–42. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>.

Edward. J Blocher, “Manajemen Biaya” (Jakarta, 2001).

- Fransiska Xaverius Sadikin, “Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas” (Yogyakarta, 2005).
- Harahap, M. “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan.” *Universitas Medan Area*, 2022.
- Irwan Moridu. “Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai.” *Jurnal Sinar Manajemen* 8, no. 2 (2021): 90–97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>.
- Ibnu Syamsi, “Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja” (Jakarta, 2007).
- Ihyaul, Ulum, “Audit Sektor Publik” (Jakarta, 2009).
- Jumame, Linda. “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong.” *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 1 (2018).
- Kanuna, Resky Sirupang, Juanda Nawawi, and Nulinah. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 58–68. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.7>.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Magdalena Y. Devinci, Yosefina Andia Dekrita, and Magdalena Silawati Samosir. “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Projemen UNIPA* 9, no. 2 (2023): 51–70. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44>.
- Musmulyadi, “Pengendalian Manajemen”. (November, 2020).
- Mahmudi. “Manajemen Kinerja Sektor Publik,” 2016.
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, “Meningkatkan Efisiensi Nasional” (Yogyakarta, 2007) .
- M. Richard steers, “Efektivitas Organisasi” (Jakarta: Air Langga, 1999).
- Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik” (Yogyakarta: Puastaka Andi 2018).
- Mahsun, M, “Pengukuran Kinerja Sektor Publik” (Tangerang Selatan, 2019).

- Oktaviani, Linda, and Ivan Budi Susetyo. "Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 3 (2022).
- Parepare, BPS Kota. "Kecamatan Bacukiki Barat Dalam Angka" 14 (2019).
- Penelitian, Lembaga, D A N Pengabdian, Kepada Masyarakat, Universitas Nahdlatul, and Ulama Surabaya. "Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Panduan Pelaksanaan Penelitian," 2021.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Pascal Books.
- Pkh, Tujuan. "Program Keluarga Harapan (PKH)," 2025, 3–5. <https://www.yumpu.com/en/document/read/5380954/p-rogr-a-mme-pemseorg>.
- Priharjanto, Akhmad, and Yuniarto Hadiwibowo. "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan." *Jurnal Info Artha* 5, no. 2 (2021).
- Rahmah Muin, Rosdiana. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 5, no. 2 (2020).
- Setyaningsih Hana, and Putri Nabila Septiana. "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang." *Jurnal Akuntan Publik* 2, no. 2 (2024).
- Statistik, Badan Pusat. "Kecamatan Bacukiki Barat Dalam Angka 2024." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2024. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII).
- Sitti Mujahida, "Pengantar Manajemen" (Makassar, 2018).

Sri Adella Fitri et, al., “Akuntansi Lembaga Publik” (2023).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006).

Yusuf Hidayat, Laila Azkia, Maulida Rachma,. “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin.” *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 4, no. 2 (2022): 93. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>.

Zulkarnain, “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2017.





INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Muhammad Naswan Malik

NIM : 2120203861211031

Judul : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan

Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk kordinator PKH kecamatan bacukiki barat di dinas sosial

1. Bagaimana mekanisme proses penyaluran dana di kecamatan bacukiki barat?
2. Apa saja faktor penting dalam penyaluran dana PKH?
3. Apakah bantuan PKH ini sudah efektif dan efisien?
4. Apa tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKH ini?
5. Apa saja yang dilakukan dalam menyusun perencanaan PKH?
6. Apakah waktu yang dibutuhkan dalam penyaluran dana PKH ini ke masyarakat sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?
7. Apakah terdapat kendala dalam penyaluran dana PKH dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
8. Bagaimana ketetapan sasaran pada PKH sudah sesuai dengan yang semestinya?
9. Bagaimana peran petugas atau pendamping PKH dalam menjamin kelancaran dan ketetapan penyaluran dana?
10. Bagaimana proses penentuan masyarakat yang menerima PKH?
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam PKH?

Pertanyaan untuk penerima bantuan PKH

1. Apa yang anda ketahui tentang PKH?
2. Bagaimana cara anda mengelola dana PKH?
3. Apakah setelah menerima bantuan PKH kebutuhan pendidikan anak anda dapat terpenuhi (ya atau tidak) dan mengapa?
4. Apakah pencairan dana PKH ini sudah tepat waktu ketika pencairan?
5. Apakah ada perubahan setelah mendapatkan bantuan PKH?



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3841/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Rezki Fani, M.M**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NASWAN MALIK
NIM : 2120203861211031
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KELURAHAN BUMI HARAPAN KAMPUNG MANDAR KOTA PAREPARE
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 22 Juli 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1747/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

14 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD NASWAN MALIK
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Pebruari 2003
NIM : 2120203861211031
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN JENDRAL SUDIRMAN, KELBUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI
BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP000443

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 443/IP/DPM-PTSP/5/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **MUHAMMAD NASWAN MALIK**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. JEND. SUDIRMAN, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENYALURAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 Mei 2025 s.d 15 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Sudirman No. 12 Parepare, Telp. (0421) 27266 Fax. 27162
Kode Pos 91122, Email: dinasosial@kotaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450/497 /Dinsos

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : ANDI ERWIN PALLAWARUKKA, AP., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD NASWAN MALIK
N I M : 2120203861211031
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Manajemen Keuangan Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)
Judul Penelitian : " Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan
Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare "

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 15 Mei s/d 15 Juni 2025 pada Dinas Sosial Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2025

Kepala Dinas,

ANDI ERWIN PALLAWARUKKA, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750805 199511 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 5 Gossang, Kota Parepare 91132 Telpone (0421) 21367, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91106, website: www.iainpare.ac.id, email: iaib@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD NASWAN MALIK
N I M : 2120203861211031
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA KELURAHAN BUMI HARAPAN KAMPUNG MANDAR KOTA
PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

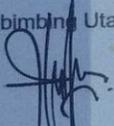
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYALURAN DANA BANTUAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA
PAREPARE

dengan alasan / dasar:
*karena keter pengelolaan keuangan daerah itu datanya sangat susah dan
saya memilih PKH sebagai subjek penelitian.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2025

Pembimbing Utama


Rezki Fari, M.M.

Mengetahui,
Dekan,


Prof. Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsul
Alamat : Jl. bambu runcing
Jenis Kelamin : 53 tahun laki-laki
Pekerjaan : Koordinator PKH kecamatan bacukiki barat
Umur : 53 tahun

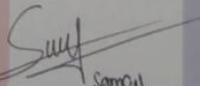
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 2 Juni 2025

Yang bersangkutan


Samsul

IAIN
PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama
Alamat : Jl. Pndral Sudirman
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IPT (Penerima bantuan PKH Kelurahan Bumi Harapan)
Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juni 2025

Yang bersangkutan


Rama

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Ptira
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman
- Jenis Kelamin : perempuan
- Pekerjaan : IRT (penetma Pkt Kelurahan Bumi Harapan)
- Umur : 40 tahun

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare...12, Juni..... 2025

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasrah
Alamat : Jl. Jendral Sudirman
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (penerima PKH Kelurahan (wmt harapan)
Umur : 45 Tahun

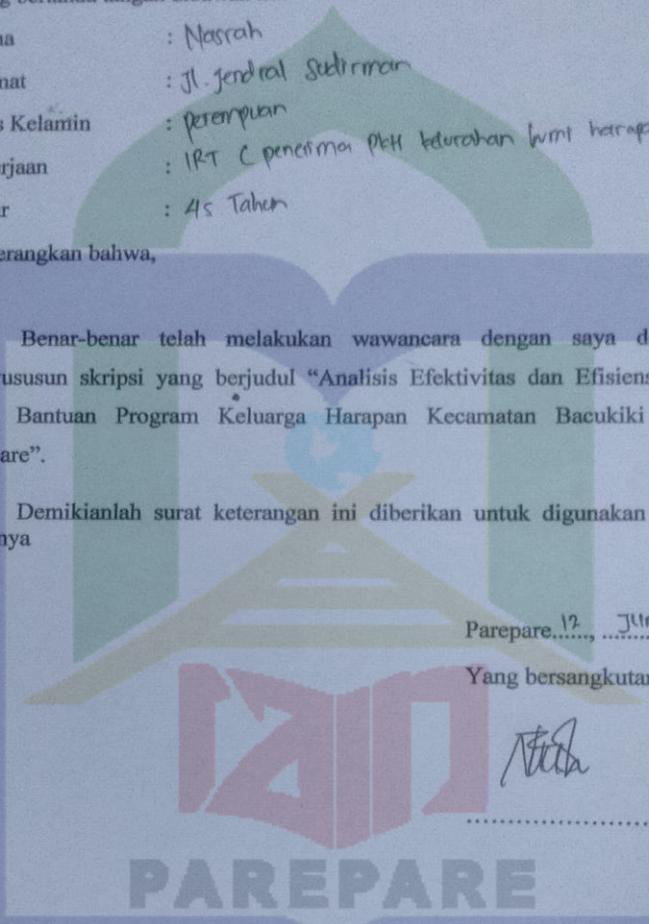
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12, Juni 2025

Yang bersangkutan



IAIN
PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhasanah
Alamat : Jl. andi dewang
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : IRT (penerima PKH Kelurahan Sumpang mirangae)
Umur : 41 tahun

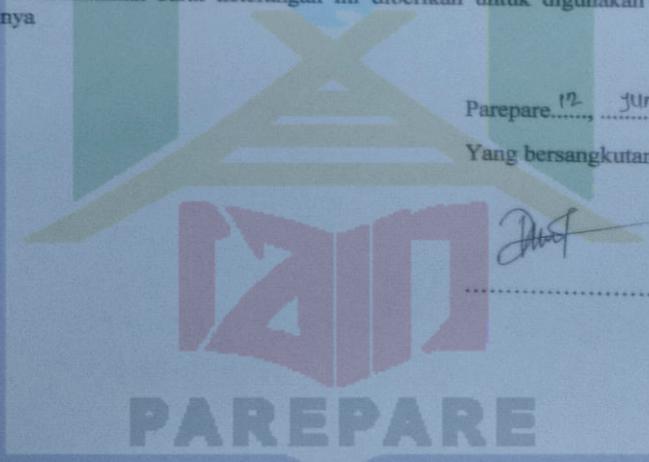
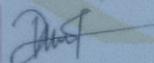
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juni 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutha
Alamat : Jl. brimob
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT (perempuan pkh Kelurahan Sumpang mirangae)
Umur : 32 tahun

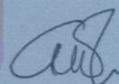
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, ¹² Juni 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarpia
Alamat : Jl. Kaw massepe
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : IRT (penerima tt bantuan PTH kelurahan bumi harapan)
Umur : 27 tahun

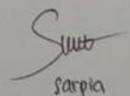
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 12 Juni 2025

Yang bersangkutan


Sarpia

PAREPARE



Dokumentasi dengan kordinator PKH Kecamatan Bacukiki Barat

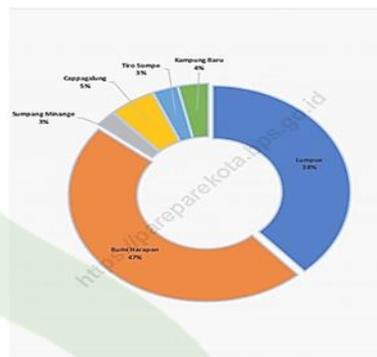
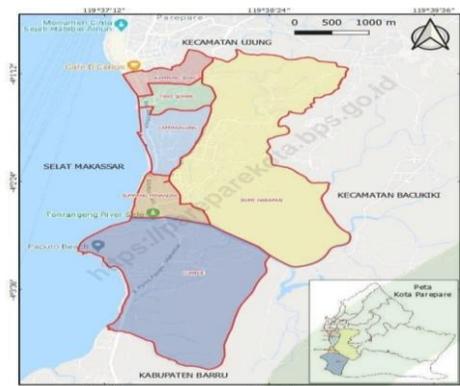


Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu untuk KPM PKH



Dokumentasi dengan ibu rasna KPM Kelurahan Bumi Harapan dan ibu sarpia Kelurahan Sumpang Minangae

PETA WILAYAH KECAMATAN BACUKIKI BARAT
MAP OF BACUKIKI BARAT DISTRICT



Tabel 3.1
Table **Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bacukiki Barat, 2023**
Population, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Villages/ Subdistrict in Bacukiki Barat District, 2023

Desa/Kelurahan Village/Subdistrict	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lumpue	4.932	5.082	10.014
Bumi Harapan	5.837	5.776	11.613
Sumpang Minange	2.827	2.991	5.818
Cappagalung	3.654	3.792	7.446
Tirosompe	3.726	3.675	7.401
Kampung Baru	2.646	2.795	5.441
Bacukiki Barat	23.622	24.111	47.733

Tabel 3.2
Table **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bacukiki Barat, 2023**
Population by Age Groups and Sex in Bacukiki Barat District, 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	2.118	1.879	3.997
5 - 9	2.207	2.114	4.321
10 - 14	2.227	2.233	4.460
15 - 19	2.156	2.048	4.204
20 - 24	2.172	2.091	4.263
25 - 29	1.946	1.918	3.864
30 - 34	1.751	1.725	3.476
35 - 39	1.722	1.657	3.379
40 - 44	1.686	1.692	3.378
45 - 49	1.487	1.567	3.054
50 - 54	1.275	1.415	2.690
55 - 59	1.013	1.237	2.250
60 - 64	799	912	1.711
65 - 69	481	629	1.110
70 - 74	284	397	681
75 +	298	597	895
Bacukiki Barat	23.622	24.111	47.733

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Muhammad Naswan Malik lahir di Parepare tanggal 4 Februari 2003, anak pertama sekaligus peneliti pertama dari empat bersaudara 3 laki-laki dan 1 perempuan dan peneliti anak dari Ridwan dan Nasrah. Peneliti tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare nama tempat tinggal peneliti lebih dikenal dengan kata kampung mandar. Adapun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2010 mulai masuk di Sekolah Dasar Inpres Negeri Makassar kemudian pindah ke SD Negeri 12 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Parepare dan lulus tahun 2018, lalu melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Parepare kemudian lulus tahun 2021, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BTN Syariah Kota Makassar pada tahun 2024 dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tenggeling Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.